

2024



KEMENTERIAN
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Cimanggis

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Depok Cimanggis merupakan salah satu bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diamanatkan. LAKIN juga merupakan ikhtisar yang menjelaskan capaian kinerja yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah;
3. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024
4. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Depok Cimanggis diharapkan dapat memberikan informasi yang terbuka bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut, LAKIN dapat menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi dan memacu kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan KPP Pratama Depok Cimanggis.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Eko Pandoyo Wisnu Bawono
NIP 19671106 199503 1 001



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja dibuat dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Depok Cimanggis merupakan salah satu bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diamanatkan. LAKIN juga merupakan ikhtisar yang menjelaskan capaian kinerja yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja.

Permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi unit kerja pada Tahun 2024 adalah permasalahan nasional seperti daya beli masyarakat yang menurun terutama di sektor jasa dan perdagangan, ditambah dengan kondisi transisi pergantian pemerintahan. Tercerminnya penurunan tersebut didukung dengan data perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2024 pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang mengalami penurunan kurang lebih -79%. Hal tersebut mendorong KPP Pratama Depok Cimanggis untuk lebih menyusun strategi untuk mencapai target penerimaan pajak Tahun 2025 yang kemudian akan tertuang secara detail dalam Laporan Kinerja KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

I. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis adalah menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak di bidang Perpajakan

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Depok Cimanggis berperan serta dan mendukung penuh Direktorat Jenderal Pajak melakukan penataan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020 - 2024, yaitu penerimaan negara yang optimal.

KPP Pratama Depok Cimanggis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama Depok Cimanggis menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

- r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK.01/2020, maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan

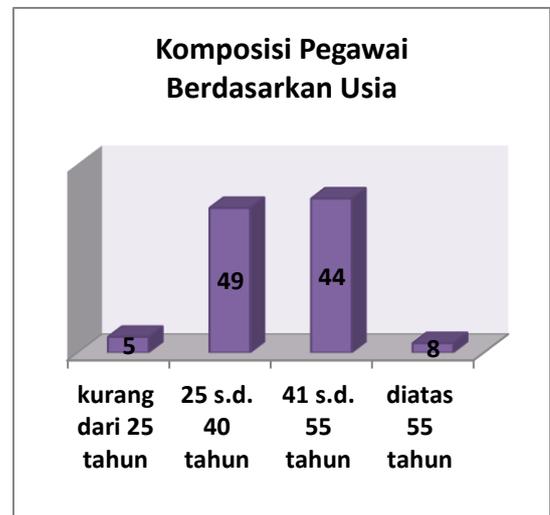
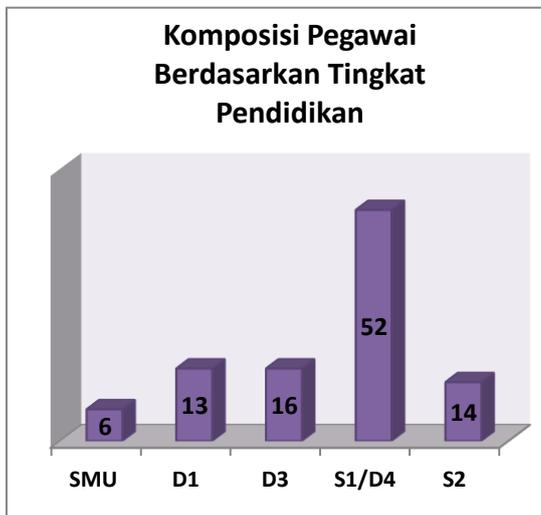
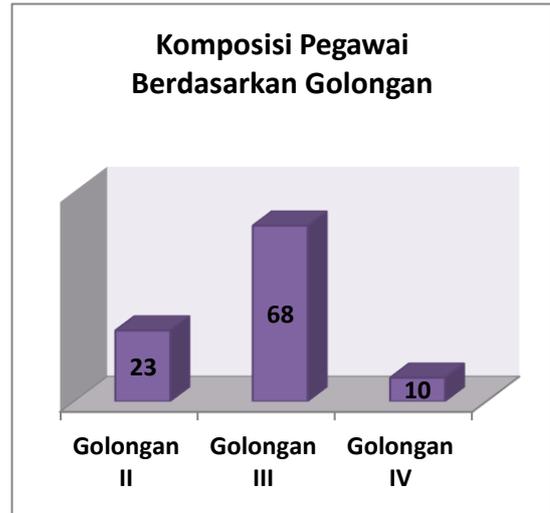
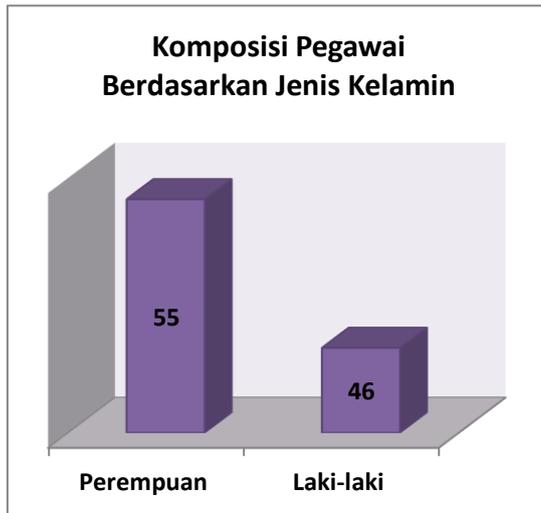
administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

II. Struktur Organisasi

Jumlah pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 101 orang yang merupakan suatu kekuatan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Jabatan/Unit Organisasi	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Jabatan Administrator	Kepala Kantor	1
2.	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi dan Kepala Subbagian	10
3.	Jabatan Fungsional	Pemeriksa Pajak	13
		Penilai Pajak	-
		Penyuluh Pajak	6
4.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sekretaris	1
		Bendahara	1
		Pelaksana Kepatuhan Internal	2
		Pelaksana Pendukung	5
5.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Pelaksana Pendukung	3
6.	Seksi Pelayanan	Pelaksana Pendukung	13
7.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Juru Sita	2
		Pelaksana Pendukung	5
8.	Seksi Pengawasan I s.d. Pengawasan VI	Account Representative	39
Jumlah			101

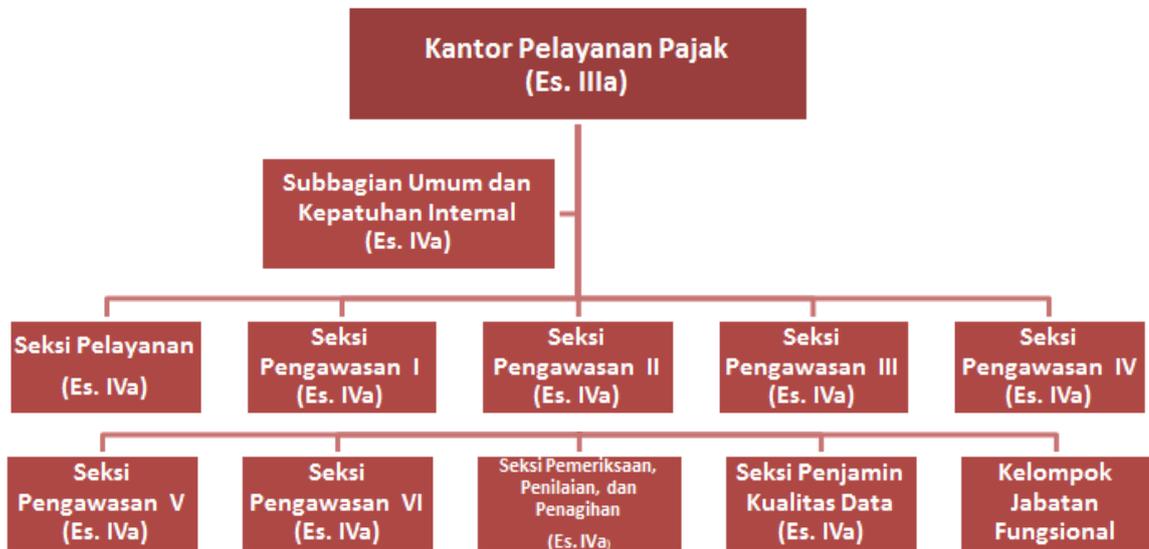


Sumber daya manusia (SDM) yang optimal menjadi aset yang sangat penting untuk keberlangsungan seluruh kegiatan di KPP Pratama Depok Cimanggis dalam mencapai tujuan organisasi. Komposisi pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis berdasarkan jenis kelamin hampir merata, yaitu 46 orang pegawai laki-laki dan 55 orang pegawai perempuan. Pegawai dengan pangkat golongan III mendominasi dengan jumlah 68 pegawai sedangkan pegawai dengan golongan II berjumlah 23 orang. Selain itu, pegawai dengan golongan IV berjumlah 10 orang yang merupakan pegawai dengan jabatan Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Pemeriksa Pajak Madya.

Pada KPP Pratama Depok Cimanggis mayoritas pegawai telah menempuh Pendidikan S1/D4 dengan jumlah 52 orang dan 14 diantaranya sudah menempuh jenjang Pendidikan S2, sedangkan sisanya tersebar pada jenjang pendidikan SMU, D1, dan D3. Hal yang dapat menjadi sorotan adalah pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki pegawai dengan usia produktif cukup banyak dengan pegawai berusia 40 tahun kebawah mencapai 49 pegawai. Kondisi tersebut mendukung KPP Pratama Depok Cimanggis

untuk menyongsong era informasi digital dan perkembangan teknologi yang terus berkembang, dan reformasi perpajakan. Selain itu, generasi muda yang cakap dan terampil sangat diperlukan untuk mendukung upaya pencapaian target organisasi.

Bagan Organisasi KPP Pratama Depok Cimanggis

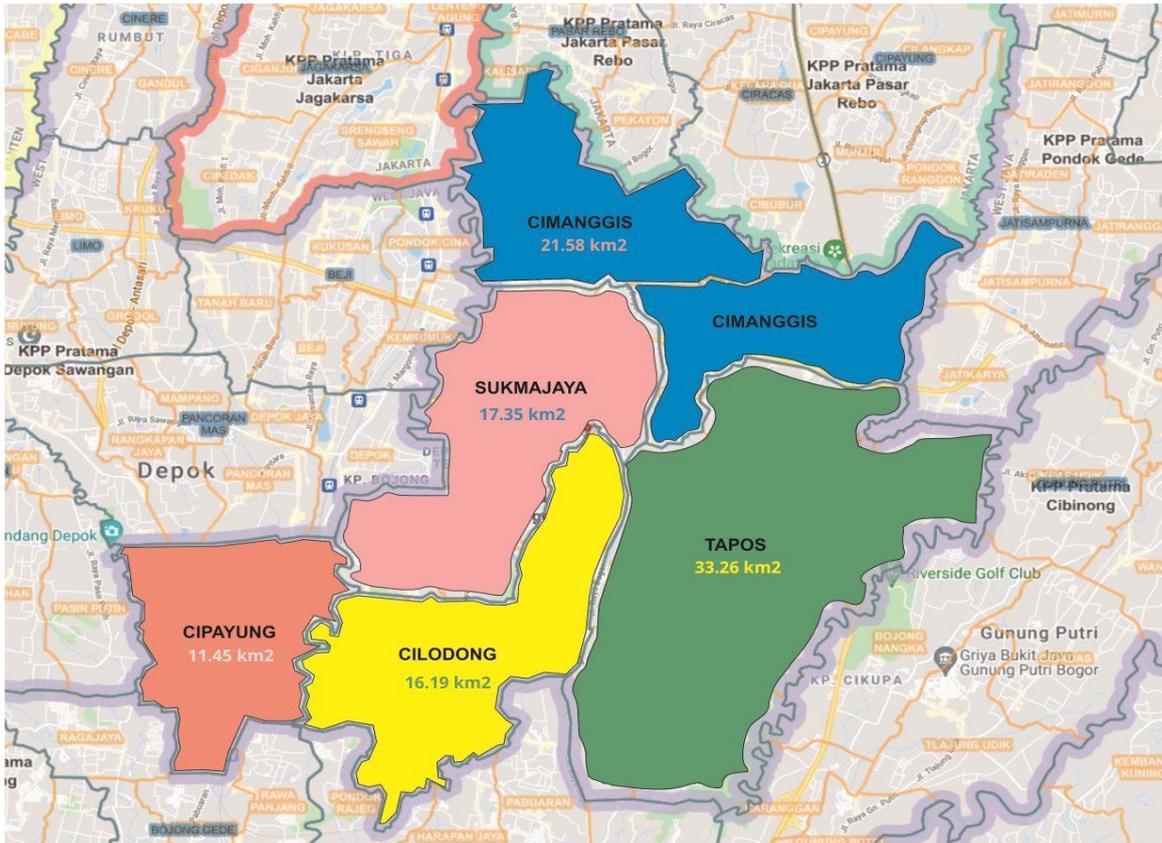


Wilayah Kerja

Kota Depok terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 5 (lima) di antaranya merupakan wilayah kerja KPP Pratama Depok Cimanggis, yaitu Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Cipayung dengan total luas wilayah kerja KPP Pratama Depok Cimanggis adalah 99,83 km² atau hampir setengah dari total luas Kota Depok. Berikut ini adalah daftar kelurahan yang masuk ke dalam wilayah kerja KPP Pratama Depok Cimanggis:

Kecamatan Cipayung	•Kelurahan Cipayung, Cipayung Jaya, Ratu Jaya, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya
Kecamatan Cilodong	•Kelurahan Kalimulya, Jatimulya, Cilodong, Kalibaru
Kecamatan Tapos	• Kelurahan Jatijajar, Sukamaju Baru, Cilangkap, Cimpaeuan, Leuwinanggung, Tapos, Sukatani
Kecamatan Sukmajaya	•Kelurahan Mekarjaya, Baktijaya, Cislak, Abadijaya Sukmajaya, Tirtajaya
Kecamatan Cimanggis	•Kelurahan Tugu, Mekarsari, Pasir Curug Selatan, Cislak Pasar, Harjamukti, Curug

Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Depok Cimanggis



Wilayah kerja KPP Pratama Depok Cimanggis diawasi oleh 6 (enam) seksi pengawasan dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

- Seksi Pengawasan I → Mengampu Wajib Pajak Strategis;
- Seksi Pengawasan II → Mengampu sebagian wilayah Kecamatan Cimanggis, yaitu Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Tugu dan Mekarsari;
- Seksi Pengawasan III → Mengampu sebagian wilayah Kecamatan Cimanggis, yaitu Kelurahan Cisalak Pasar, Harjamukti dan Curug;
- Seksi Pengawasan IV → Mengampu seluruh wilayah Kecamatan Sukmajaya, yang terdiri dari Kelurahan Sukmajaya, Mekarjaya, Tirtajaya, Abadijaya, Baktijaya dan Cisalak;
- Seksi Pengawasan V → Mengampu seluruh wilayah Kecamatan Tapos, yang terdiri dari Kelurahan Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Leuwinanggung, Jatijajar, Sukamaju Baru dan Sukatani; dan
- Seksi Pengawasan VI → Mengampu seluruh wilayah Kecamatan Cilodong yang terdiri dari Kelurahan Kalimulya, Jatimulya, Kalibaru, Cilodong, Sukamaju dan Kecamatan Cipayung, yang terdiri dari Kelurahan Cipayung Jaya, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya, Ratu Jaya dan Cipayung.

C. Sistematika Pelaporan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan PermenPAN-RB nomor 53 Tahun 2014 terdiri dari 4 Bab Utama yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup. Pada Bab Akuntabilitas Kinerja akan disajikan capaian kinerja organisasi yang memuat capaian kinerja per triwulan, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja. Adapun kerangkanya adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - I. Tugas dan Fungsi
 - II. Struktur Organisasi
- C. Sistematika Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-lain
- E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

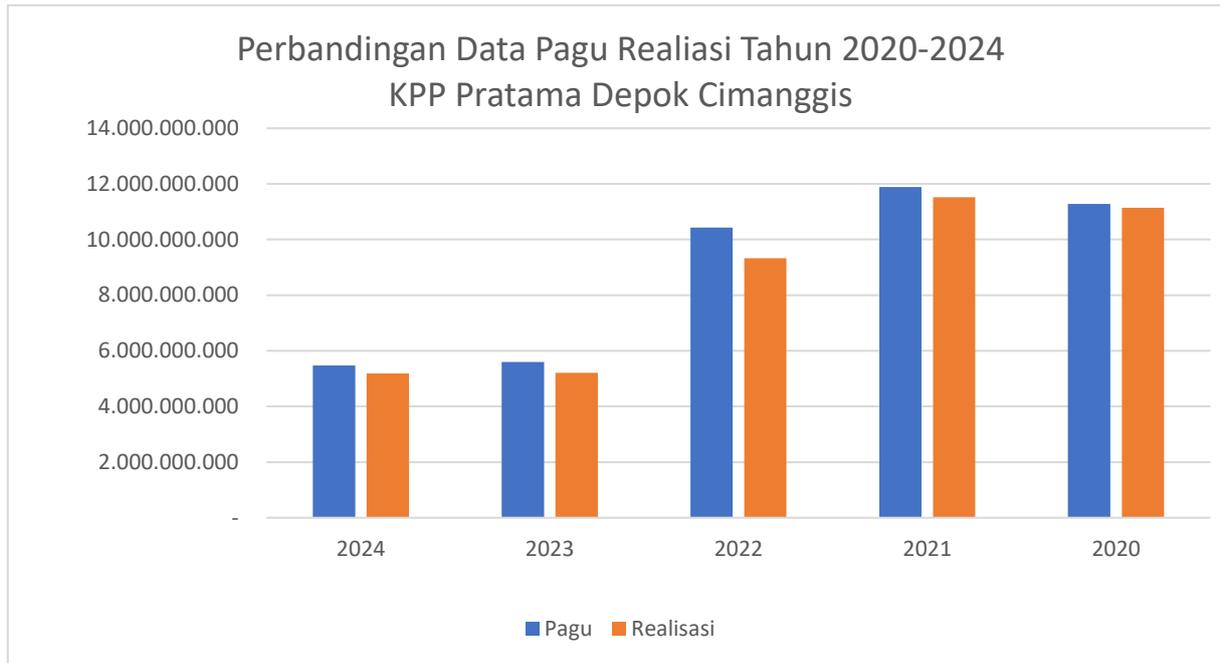
A. Perencanaan Strategis

Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 24 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Depok Cimanggis TA 2024 adalah sebesar Rp 5,186,636,396,- atau mencapai 94,72% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp 5,475,660,000,-. Penyerapan DIPA tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 1.68% sedangkan untuk pagu anggaran ada penurunan sebesar 2,1% dan pada TA 2024 terdapat reformulasi penilaian Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) yang berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan anggaran dalam rangka optimalisasi pencapaian IKU IKKPA TA 2024.

Seluruh kegiatan KPP Pratama Depok Cimanggis dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 951,281,000,- (90,52% dari pagu sebesar Rp1,050,866,000,-), dan belanja barang mencapai sebesar Rp4,253,059,061,- (93,62% dari pagu sebesar Rp4,542,892,000). Realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran dalam periode 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tahun	Pagu	Realisasi
2024	5.475.660.000	5.186.636.396
2023	5.593.758.000	5.204.340.061
2022	10.425.585.000	9.323.049.031
2021	11.892.263.000	11.524.266.800
2020	11.278.672.000	11.138.412.514
	44.665.938.000	42.376.704.802



Sumber: Aplikasi OMSPAN per tanggal 24 Januari 2025

Bahwa untuk TA 2020 s.d. 2022, Belanja Pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan kinerja masih dilakukan oleh masing-masing satker sedangkan mulai TA 2023 pembayaran tersebut sudah dilakukan secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Depok Cimanggis, pada TA 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN TAHUN 2024

NO	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	4707 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	3.605.517.000	3.423.081.885	(94.94%)	182.435.115
2	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	896.684.000	814.279.000	(90.81%)	82.405.000
3	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	421.670.000	410.355.796	(97.32%)	11.314.204
4	4792 Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	255.818.000	246.465.815	(96.34%)	9.352.185
5	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	295.971.000	292.453.900	(98.81%)	3.517.100
Grand Total		5.475.660.000	5.186.636.396	(94.72%)	289.023.604

Sumber: Aplikasi SAKTI per tanggal 24 Januari 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan

langsung oleh KPP Pratama Depok Cimanggis, persentase penyerapan belanja tertinggi sebesar 99,81% adalah pada kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum sedangkan persentase penyerapan belanja terendah sebesar 90,81% adalah pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM.

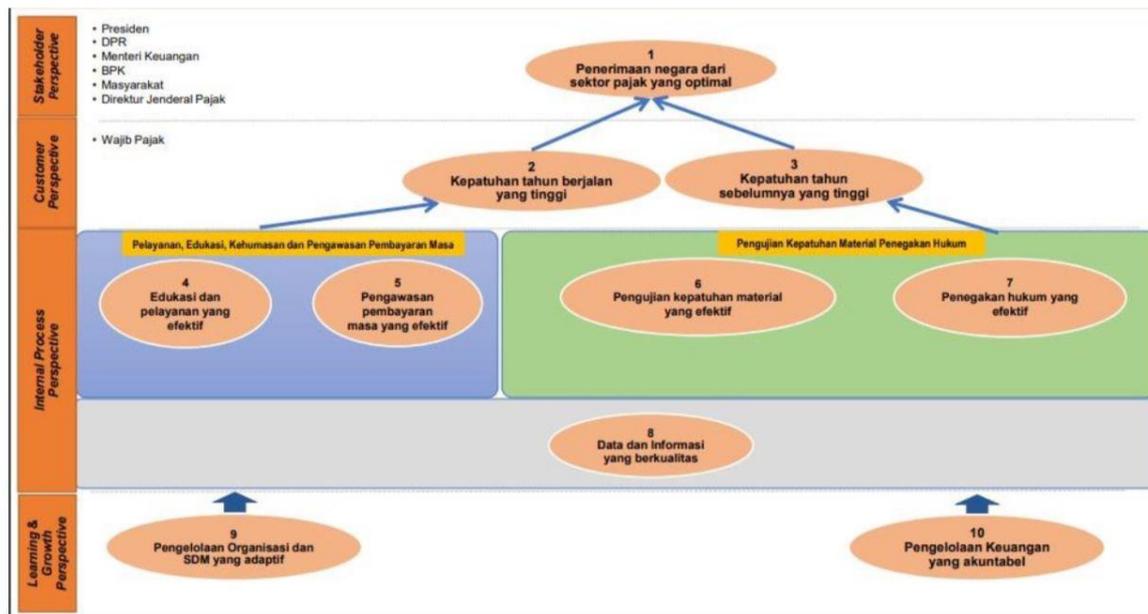
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) Merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja 2024 dibuat pada tanggal 31 Januari 2024 oleh Kepala Kantor selaku pegawai yang dinilai dan Kepala Kantor Wilayah Selaku Pejabat Penilai Kinerja. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pratama Depok Cimanggis nomor PK-5/WPJ.33/2024 dengan peta strategi sebagai berikut:

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



Sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dibuat oleh seluruh pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis dan ditandatangani oleh atasan langsung pada tanggal 1 Januari 2024.

Proses perencanaan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). PK disusun pada level Kementerian, UPK— One, UPK— Two, dan UPK— Three. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS) (opsional). Kepala Kantor KPP Pratama selaku UPK-Three membuat perjanjian kinerja dengan minimal jumlah IKU 10 dan maksimal 20 IKU. Proses penyusunan PK pada UPK— Three dilakukan melalui refinement berdasarkan hasil review PK tahun sebelumnya dengan mengacu pada PK unit organisasi pada level di atasnya serta rencana strategis UPK tersebut. Proses penjabaran dan penyelarasan PK meliputi SS dan IKU dilakukan melalui proses cascading dan alignment.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) merumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Seluruh SS dalam organisasi dituangkan dalam Peta Strategi. Setiap SS diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketereapaian sasaran tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem manajemen risiko untuk mendukung pencapaian sasaran. Untuk mencapai target: IKU, organisasi dapat merumuskan kegiatan terobosan yang disebut Inisiatif Strategis (IS). Seluruh proses perencanaan strategis dan eksekusi strategi, dalam perumusannya selalu dilandasi dengan nilai—nilai yang menjadi jati diri Kementerian Keuangan.

IKU Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis termasuk dalam rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa diantaranya adalah:

- Persentase realisasi penerimaan pajak
- Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
- Persentase pengawasan pembayaran masa
- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Sehubungan dengan nota dinas dari Direktur Jenderal Pajak nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11 September 2024 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024, dalam pelaksanaannya, Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis terdapat adendum. Terjadi perubahan target pada IKU “Indeks penilaian integritas unit” yang semula target terdapat pada Triwulan IV sebesar 85 menjadi target terdapat pada triwulan III dan triwulan IV sebesar 85. Adendum ini ditetapkan oleh Kepala Knator pada tanggal 2 September 2024 dan telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja selaku Kepala Kantor Wilayah.

Beberapa IKU pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis periode tahun 2024 masuk terdapat inisiatif strategis. Prioritas memilih IS dapat menggunakan kuadran yang mengkombinasikan impact dan effort. Prioritas pertama merupakan IS yang memiliki impact tinggi namun dapat dicapai dengan effort terendah. Berikut adalah contoh penerapan IS pada KPP Pratama Depok Cimanggis:

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Kegiatan	Output
1	Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak pada tahun berjalan dengan pemanfaatan STP, dinamisasi PPh Pasal 25 dan tindak lanjut data	1. Meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak 2. Penerimaan setiap masa pajak yang teratur	Q1: Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan Q2: Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/ Tahunan; Q3: Penerbitan STP atas keterlambatan / kekurangan pembayaran PPh, PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Q4: Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak	Q1: Surat Tagihan Pajak Q2: Surat Tagihan Pajak Q3: Surat Tagihan Pajak Q4: Surat Tagihan Pajak
2	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Mengoptimalkan data penggalian potensi yang telah tersedia yang kemudian dituangkan ke dalam	1. Tersedianya bahan potensi perpajakan yang digunakan sebagai acuan dalam penggalian effort	Q1: Pemanfaatan data E- Faktur; PKPM, Apportal Q2: Pemanfaatan data E- Faktur; PKPM,	Q1: Kertas Kerja Penggalian Potensi, SP2DK Q2: Kertas Kerja Penggalian Potensi, SP2DK Q3: Kertas Kerja

		komitmen pembayaran Wajib Pajak	2. Adanya komitmen dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran	Apportal Q3: Pemanfaatan dataE- Faktur; PKPM, Apportal Q4: Konseling / Pemanggilan Pengurus Badan / WP OP	Penggalian Potensi, SP2DK Q4: Berita Acara
3	Tingkat Efektivitas Penagihan	Memastikan bahwa pencegahan ditujukan kepada Wajib Pajak yang berpotensi melunasi utang pajak	1. Usulan pencegahan ke Kantor Wilayah 2. Berita Acara Gelar Perkara 3. Meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak	Q1: Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Q2: Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Q3: Penjualan Barang Sitaan Q4: Usulan/ Pencegahan Penyanderaan Penanggung Pajak	Q1: Surat Perintah melakukan penyitaan Q2: Surat Perintah melakukan penyitaan Q3: Pengumuman Lelang Q4: NDR Pencegahan
4	Presentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Pengumpulan data di lapangan yang dapat dijadikan potensi dalam penerimaan pajak	Terpenuhinya data potensi perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk KPP sendiri atau KPP lain	Q1: Kegiatan pengumpulan data lapangan Q2: Kegiatan pengumpulan data lapangan Q3: Kegiatan pengumpulan data lapangan Q4: Reviu pelaksanaan kegiatan	Q1: Formulir KPDL Q2: Formulir KPDL Q3: Formulir KPDL Q4: Angka realisasi kegiatan
5	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan efisiensi anggaran	1. Laporan reviu Triwulanan 2. Laporan Pertanggungjawa ban Tunjangan Kinerja	Q2: Menyusun dokumen permintaan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Q2: Menyusun dokumen permintaan pertanggungjawaban pembayaran	Q2: Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja Q2: Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja

Inisiatif Strategis (IS) diterapkan oleh sistem manajemen risiko untuk mendukung pencapaian sasaran untuk mencapai target IKU Organisasi sehingga berimplikasi pada pencapaian SS. IS berbeda dengan rekomendasi rencana aksi. Perbedaan utamanya yakni Inisiatif Strategis bersifat preventif sedangkan rekomendasi rencana aksi bersifat korektif. IS umumnya disusun pada awal tahun untuk mencapai target IKU pada Sasaran

Strategis yang memerlukan suatu terobosan atau tidak dapat dicapai dengan kegiatan rutin, sedangkan rekomendasi rencana aksi disusun apabila terdapat indikasi atau kondisi dimana target IKU tidak tercapai pada periode monitoring sepanjang tahun berjalan.

a) Kriteria Penyusunan Inisiatif Strategis

1. Memiliki relevansi terhadap pencapaian target IKU;
 2. Mempersempit gap pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;
 3. Disusun pada unit yang memiliki peta strategi dan berada pada internal process perspective dan learning and growth perspective;
 4. Menghasilkan output/outcome;
 5. Memiliki trajectory penyelesaian kegiatan dan output bulanan/ triwulanan;
 6. Memiliki periods waktu penyelesaian;
 7. Mencantumkan informasi alokasi anggaran (jika ada); dan
 8. Memiliki penanggung jawab utama (koordinator).
- Dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Penerimaan pajak merupakan kontributor utama pendapatan negara di dalam APBN. Dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, DJP berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri. Dari Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa porsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara yang dianggarkan di dalam APBN sepanjang periode 2015 — 2019 selalu di atas 70 persen (kecuali pada tahun 2018). Dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024, Tax Ratio Indonesia dalam arti luas pada proyeksi postur APBN 2020 – 2024 adalah sebesar 11,8 – 12,8 persen. Dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan terhadap PDB, beberapa komponen yang mempengaruhi antara lain:

- a. Kondisi ekonomi
- b. Kebijakan perpajakan
- c. Kapasitas administrasi

Penerimaan pajak yang tertuang pada IKU Persentase realisasi penerimaan pajak, KPP Pratama Depok Cimanggis telah mencapai target sebesar 100% dengan target sebesar Rp 1.411.633.787.000 telah tercapai dari target penerimaan perpajakan pada RAPBN 2024 sebesar Rp2.307,9 triliun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75	75	100%	100%
Realisasi	28,85%	49,71%	49,71%	67,03%	67,03%	100%	100%
Capaian	115,40	99,42	99,42	89,37	89,37	100	100

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A PPh Non Migas	600.183.720.000	598.498.451.851	597.253.365.371	-21,81	-0,50	102,99	99,51
B PPN & PPnBM	772.635.558.000	716.597.834.736	772.696.440.087	11,39	2,05	103,79	100,01
C PBB	-	-	-	100,0	-	-	-
D Pajak Lainnya	38.814.509.000	41.847.672.838	41.676.560.617	0,77	-0,41	92,34	107,37
E PPh Migas	-	-	3.871.364	100,0	-	-	-
Total Non PPh Migas	1.411.633.787.000	1.356.943.959.425	1.411.626.366.075	-6,42	0,88	103,04	100
Total termasuk PPh Migas	1.411.633.787.000	1.356.943.959.425	1.411.630.237.439	-7,1	0,88	103,21	100

Sumber: Apportal DJP

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 1.411.630.237.439 dengan capaian sebesar 100%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 0,88% lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -7,1%.

Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER					
			2024	2023	% Growth 2022-2023	% Growth 2023-2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	1. PPH NON MIGAS	600.183.720.000	597.253.365.371	598.498.451.851	-21,81	-0,50	102,99	99,51
	PPH Pasal 21	283.800.395.000	283.805.904.212	228.880.740.550	-2,16	23,29	98,51	100,00
	PPH Pasal 22	10.409.854.000	11.410.717.581	10.304.395.949	21,88	11,43	134,31	109,61
	PPH Pasal 22 Impor	46.279.538.000	46.384.689.595	47.523.137.483	-5,22	-3,47	94,61	100,23
	PPH Pasal 23	30.283.396.000	30.283.396.638	45.232.758.401	-7,05	-33,09	96,48	100,00
	PPH Pasal 25/29 OP	61.386.630.000	57.386.630.886	52.820.208.995	33,26	7,89	99,22	93,48
	PPH Pasal 25/29 Badan	8.404.663.000	8.402.275.721	39.292.660.144	14,33	-78,72	121,08	99,97
	PPH Pasal 26	1.438.656.000	1.438.656.434	1.628.577.273	-17,05	-11,66	0,00	100,00
	PPH Final	158.180.588.000	158.141.094.304	172.815.973.056	-50,39	-8,16	109,16	99,98
	PPH Fiskal Luar Negeri	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPH Non Migas Lainnya	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
B	2. PPN dan PPnBM	772.635.558.000	772.696.440.087	716.597.834.736	11,39	2,05	103,79	100,01
	PPN Dalam Negeri	638.960.064.000	639.039.650.909	556.642.878.751	23,23	7,18	104,92	100,01
	PPN Impor	130.702.690.000	130.702.690.126	153.313.224.076	-10,33	-15,09	95,87	100,00
	PPnBM Dalam Negeri	38.662.000	38.662.927	97.450.814	576,20	-91,35	0,00	100,00
	PPnBM Impor	2.934.142.000	2.934.142.412	294.879.000	-78,30	895,03	0,00	100,00
	PPN Lainnya	-	18.706.287	24.808.906	-116,39	24,60	0,00	0,00
	PPnBM Lainnya	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C	PBB dan BPHTB	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00
D	Pajak Lainnya	38.814.509.000	41.676.560.617	41.847.672.838	0,77	-0,41	92,34	107,37
E	PPH MIGAS	-	3.871.364	-	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total Non PPh Migas	2.784.453.065.000	2.781.576.171.533	2.665.766.035.011	472	729	1.253	1.510
	Total Termasuk Non PPh Migas	2.784.453.065.000	2.781.580.042.897	2.665.766.035.011	572	729	1.253	1.510

Sumber: Apportal DJP

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp. 639.039.650.009 (*growth* 7,18%), diikuti PPnBM Impor senilai Rp. 2.934.142.412 (*growth* 895,03%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp. 283.805.904.212 (*growth* 23,29%), diikuti PPh

Pasal 22 sebesar Rp. 11.410.717.581 (*growth* 11,43%), dan PPh Pasal 25/20 OP sebesar Rp. 57.386.630.886 (*growth* 7,89%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	91,11 %	92,89%	125,45%	103,22%	100%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100%. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM;
2. Meningkatnya capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
3. Meningkatnya kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penagihan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

Membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 dikarenakan Pengawasan Tindaklanjut Penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Tindaklanjut Penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material telah dilakukan unit kerja dengan maksimal.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan;
- Menerbitkan STP atas keterlambatan laporan dan setoran;
- Melakukan penelitian terhadap setoran pajak yang mengalami penurunan secara signifikan;
- Menetapkan Wajib Pajak pembayar terbesar sebagai langkah mempermudah dalam melakukan pengawasan pembayaran;
- Pengawasan setoran bendahara pemerintah;
- Tindak lanjut data matching (data pemicu dan data penguji) dan data DSP4 Kolaboratif;
- Melakukan analisa laporan keuangan Wajib Pajak Lokasi;
- Penelitian Faktur Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
- Melakukan tindak lanjut SP2DK DPP dan SP2DK outstanding, melalui kegiatan Konseling dan Visit ke Wajib Pajak;
- Melakukan kegiatan kolaboratif dengan konseling terhadap WP baik dengan FPP maupun PPNS;
- Melakukan usulan pemeriksaan khusus sebagai tindaklanjut kegiatan pengawasan;
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan data konkret;
- Telah dilakukan upaya penagihan secara aktif;
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
5. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
3. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
4. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Melakukan pengawasan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan;
- b. Menerbitkan STP atas keterlambatan laporan dan setoran;
- c. Melakukan penelitian terhadap setoran pajak yang mengalami penurunan secara signifikan;
- d. Menetapkan Wajib Pajak pembayar terbesar sebagai langkah mempermudah dalam melakukan pengawasan pembayaran;
- e. Pengawasan setoran bendahara pemerintah;
- f. Pemanfaatan data dan Penelitian dalam rangka penyusunan DPP, meliputi kegiatan;
- g. Tindak lanjut data matching (data pemicu dan data penguji) dan data DSP4 Kolaboratif;
- h. Melakukan analisa laporan keuangan Wajib Pajak Lokasi;
- i. Penelitian Faktor Pajak/Bukti Potong yang telah diterbitkan tetapi tidak dilaporkan;
- j. Melakukan tindak lanjut SP2DK DPP dan SP2DK outstanding, melalui kegiatan Konseling dan Visit ke Wajib Pajak;

- k. Melakukan kegiatan kolaboratif dengan konseling terhadap WP baik dengan FPP maupun PPNS;
- l. Melakukan usulan pemeriksaan khusus sebagai tindak lanjut kegiatan pengawasan;
- m. Mempercepat penyelesaian pemeriksaan data konkret;
- n. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu terkait risiko atas Penerimaan pajak yang berasal dari Sektor Industri Pengolahan masih di bawah target yang telah ditetapkan dimitigasi dengan optimalisasi fungsi analisis data dan potensi pajak antara seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut antara lain yaitu terdapat Wajib Pajak dengan restitusi yang besar menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak pada Triwulan III tidak mencapai target diatasi dengan:

- a. Memilah Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas, yang akan dilakukan tindaklanjut dalam pengawasan kegiatan PPM dan PKM;
 - b. Melakukan pengawasan lebih intensif atas pembayaran rutin, terutama Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak sektor Bendahara Pemerintah;
 - c. Melakukan bedah profile Wajib Pajak untuk dilakukan penelitian secara komprehensif;
 - d. Penggalan potensi dengan melakukan analisa laporan keuangan;
 - e. Melakukan pemanggilan Wajib Pajak untuk dilakukan konseling yang dikolaborasikan dengan FPP di KPP;
 - f. Melakukan visit ke Wajib Pajak dalam rangka percepatan tindak lanjut SP2DK Outstanding dan DPP Tahun 2025 yang belum terealisasi;
 - g. Meningkatkan kegiatan kolaborasi dengan PPNS di kanwil baik untuk kegiatan konseling pengawasan dan pendampingan penagihan aktif;
 - h. Melakukan manajemen restitusi yang diperlukan secara terukur dan terencana;
 - i. Menindaklanjuti ketetapan-ketetapan yang akan daluwarsa (Kegiatan Penagihan);
 - j. Menginventarisasi Wajib Pajak Rugi tidak Lebih Bayar, yang kemudian diusulkan untuk usulan pengawasan dan pemeriksaan rutin RTLB;
 - k. Monitoring restitusi dari Seksi Pelayanan agar dikoordinasikan dengan Seksi Pengawasan agar dapat diinput ke dalam Rencana Penerimaan;
 - l. Meneliti Wajib Pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan untuk dilakukan post audit.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan	2025
Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025	
Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal	
Memilah Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas, yang akan dilakukan tindak lanjut dalam pengawasan kegiatan PPM dan PKM	
Melakukan pengawasan lebih intensif atas pembayaran rutin, terutama WP Besar dan WP sektor Bendahara Pemerintah	
Melakukan bedah profile Wajib Pajak untuk dilakukan penelitian secara komprehensif	
Penggalan potensi dengan melakukan analisa laporan keuangan	
Melakukan pemanggilan Wajib Pajak untuk dilakukan konseling yang dikolaborasikan dengan FPP di KPP	
Melakukan visit ke Wajib Pajak dalam rangka percepatan tindak lanjut SP2DK Outstanding dan DPP Tahun 2025 yang belum terealisasi	
Meningkatkan kegiatan kolaborasi dengan PPNS di kanwil baik untuk kegiatan konseling pengawasan dan pendampingan penagihan aktif	
Melakukan manajemen restitusi yang diperlukan secara terukur dan terencana	
Menindaklanjuti ketetapan-ketetapan yang akan daluwarsa (Kegiatan Penagihan)	
Menginventarisasi Wajib Pajak Rugi tidak Lebih Bayar, yang kemudian diusulkan untuk usulan pengawasan dan pemeriksaan rutin RTLB	
Monitoring restitusi dari Seksi Pelayanan agar dikoordinasikan dengan Seksi Pengawasan agar dapat diinput ke dalam Rencana Penerimaan	
Meneliti Wajib Pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan untuk dilakukan post audit	

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,13%	103,31%	103,31%	101%	101%	92,34%	92,34%
Capaian	98,13%	103,31%	103,31%	101%	101%	92,34%	92,34%

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan

penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal: (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak). Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah

realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq 1,00\%$	120
$1,00\% < \text{Deviasi} \leq 4,00\%$	110
$4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$	100
$8,00\% < \text{Deviasi} \leq 12,00\%$	90
$12,00\% < \text{Deviasi} \leq 16,00\%$	80
Deviasi $> 16,00\%$	70

- **Realisasi IKU**

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih Pertumbuhan Nasional: 5,02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
330 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	34.289.034.087.154	31.020.672.829.684	10,54%	110,54%	105,26%	107,37%
412 - PRATAMA DEPOK CIMANGGIS	1.542.491.844.184	1.431.349.301.080	7,76%	107,76%	102,61%	104,67%

Sumber: Mandor DJP

Pertumbuhan bruto di tahun 2024 senilai Rp. 1.542.491.844.186 dengan dengan capaian sebesar 104,67%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,76% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 102,61%.

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih Data update terakhir: 06-01-2024 08:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi s.d. Tr 4	Deviasi Per Triwulan				Deviasi s.d. Tr 4	Realisasi IKU% s.d. Tr 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
330 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	31.766.801.766.222	31.998.588.324.846	4,14%	4,00%	3,97%	5,19%	3,38%	4,14%	100,00%
412 - PRATAMA DEPOK CIMANGGIS	1.433.534.131.773	1.411.630.237.439	12,57%	15,51%	4,33%	15,00%	15,44%	12,57%	80,00%

Sumber: Mandor DJP

Realisasi deviasi di tahun 2024 senilai 80% dimana deviasi yang tinggi terdapat pada triwulan 1 senilai 12,57% dan triwulan 4 senilai 15,44% dengan realisasi nilai Rp. 1.411.630.237.439 dengan prognosa senilai Rp. 1.433.534.131.773.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	109,14%	92,34%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 senilai 92,34%, hal ini dikarenakan karena proses penghitungan prognosa yang belum akurat dan adanya penerimaan yang tidak bisa diprediksi secara detail.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	92,34%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak terdapat pada target dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dan RPJMN. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 senilai 92,34%, hal ini dikarenakan karena proses penghitungan prognosa yang belum akurat dan adanya penerimaan yang tidak bisa diprediksi secara detail.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	92,34%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak termasuk dalam standar nasional APBN. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 senilai 92,34%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pengawasan setoran Wajib Pajak tahun sebelumnya, terutama untuk Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan untuk mendongkrak pengawasan rutin tahun berjalan;
- b. Pengawasan pembayaran Bea Meterai dan pengawasan setoran Bendaharawan Pemerintah;

- c. Penerbitan STP atas keterlambatan setoran pajak serta melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
 - d. Penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan;
 - e. Melakukan konseling dan imbauan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK dan/atau STP/SKP;
 - f. Melakukan pembahasan rencana dan penetapan prognosa penerimaan setiap bulan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Capaian signifikan pada pertumbuhan bruto di tahun 2024 senilai Rp. 1.542.491.844.186 dengan dengan capaian sebesar 104,67%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,76% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional sebesar 102,61%.
- b. Pendorong penerimaan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Terdapat kendala dalam realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yaitu proses penghitungan prognosa yang belum akurat dan adanya penerimaan yang tidak bisa diprediksi secara detail.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- a. Pengawasan setoran Wajib Pajak tahun sebelumnya, terutama untuk Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan untuk mendongkrak pengawasan rutin tahun berjalan;
- b. Pengawasan pembayaran Bea Meterai dan pengawasan setoran Bendaharawan Pemerintah;
- c. Penerbitan STP atas keterlambatan setoran pajak serta melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- d. Penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan;
- e. Melakukan konseling dan imbauan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK dan/atau STP/SKP;
- f. Melakukan pembahasan rencana dan penetapan prognosa penerimaan setiap bulan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;

- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dilakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah melakukan pengawasan setoran Wajib Pajak tahun sebelumnya, terutama untuk Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan untuk mendongkrak pengawasan rutin tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki kendala yaitu dalam realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yaitu proses penghitungan prognosa yang belum akurat dan adanya penerimaan yang tidak bisa diprediksi secara detail. Hal tersebut diatasi dengan:

- a. Pengawasan setoran Wajib Pajak tahun sebelumnya, terutama untuk Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan untuk mendongkrak pengawasan rutin tahun berjalan;
- b. Pengawasan pembayaran Bea Meterai dan pengawasan setoran Bendaharawan Pemerintah;
- c. Penerbitan STP atas keterlambatan setoran pajak serta melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- d. Penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan;
- e. Melakukan konseling dan imbauan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2DK dan/atau STP/SKP;

- f. Melakukan pembahasan rencana dan penetapan prognosa penerimaan setiap bulan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Meningkatkan pengawasan setoran Wajib Pajak tahun sebelumnya, terutama untuk Wajib Pajak Besar dan Wajib Pajak Penentu Penerimaan untuk mendongkrak pengawasan rutin tahun berjalan	2025
Meningkatkan penerbitan STP atas keterlambatan setoran pajak serta melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25	
Penggalian potensi WP Sektor tumbuh dominan	
Meningkatkan pengawasan pembayaran Bea Meterai dan pengawasan setoran Bendaharawan Pemerintah	

Melakukan pengawasan lebih intensif atas pembayaran rutin, terutama WP Besar dan WP sektor Bendahara Pemerintah	
Meningkatkan penyampaian Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan	
Melakukan penyusunan prognosa penerimaan secara detil setiap bulan, dengan memanfaatkan data historis dan informasi terkini dari Seksi terkait	
Mengamati perkembangan proses bisnis tertentu untuk diterapkan pada setoran WP yang berdampak, baik positif maupun negatif	

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	51,79%	51,79%	70,89%	70,89%	100%	100%
Capaian	0	103,58	103,58	94,52	94,52	100	100

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

A. Target s.d. Desember 2024	1.411.633.787.000
1. PPM	1.327.169.982.000
2. PKM	84.463.805.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024	1.411.630.237.439
1. PPM	1.327.109.026.522
2. PKM	84.521.210.917
Capaian Penerimaan	100,00 %
Capaian PPM	100,00 %
Capaian PKM	100,07 %
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024	(3.549.561)
1. PPM	(60.955.478)
2. PKM	57.405.917

Sumber: Aplikasi DRM DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi DRM DJP, Capaian IKU untuk Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100% dengan realisasi senilai Rp. 1.327.109.026.522 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	91,79%	129,20%	106,79%	100%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100%. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM;
2. Meningkatnya capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
3. Meningkatnya kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penagihan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

Membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 dikarenakan Pengawasan Tindakanlanjutan Penerimaan dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa telah dilakukan unit kerja dengan maksimal.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pemantauan kewajiban pembayaran pajak tahun berjalan, terutama untuk Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan;
- b. pemantauan kewajiban setoran atas WP bendahara pemerintah
- c. Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh, PPN
- d. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian pada tahun berjalan serta dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- e. Pemanfaatan dan tindak lanjut alket melalui kegiatan KPDL
- f. Konseling / Pemanggilan Pengurus Badan / WP OP
- g. Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak hasil kegiatan DSE terkait pembayaran pajaknya

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
 3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
 5. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui , terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 3. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan

4. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- a. Pemantauan kewajiban pembayaran pajak tahun berjalan, terutama untuk Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan;
- b. pemantauan kewajiban setoran atas WP bendahara pemerintah;
- c. Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh, PPN;
- d. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian pada tahun berjalan serta dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- e. Pemanfaatan dan tindak lanjut alket melalui kegiatan KPDL;
- f. Konseling / Pemanggilan Pengurus Badan / Wajib Pajak OP;
- g. Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak hasil kegiatan DSE terkait pembayaran pajaknya

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh *Account Representative*.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu terdapat Wajib Pajak yang belum melakukan penyetoran kewajibannya di setiap bulannya hal ini diatasi dengan:

- a. Pemantauan kewajiban pembayaran pajak tahun berjalan, terutama untuk Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan;
- b. pemantauan kewajiban setoran atas WP bendahara pemerintah;
- c. Penerbitan STP atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PPh, PPN;
- d. Melakukan penelitian dan menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian pada tahun berjalan serta dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- e. Pemanfaatan dan tindak lanjut alket melalui kegiatan KPDL;
- f. Konseling / Pemanggilan Pengurus Badan / Wajib Pajak OP;
- g. Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak hasil kegiatan DSE terkait pembayaran pajaknya

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Meningkatkan pemantauan kewajiban pembayaran pajak tahun berjalan, terutama untuk Wajib Pajak besar dan Wajib Pajak penentu penerimaan	2025
Memonitor dan menindaklanjuti data pemicu yang turun pada tahun berjalan	
Memonitor dan menindaklanjuti daftar nominatif STP yang diturunkan pada tahun berjalan	
Melakukan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dan pendekatan kepada Wajib Pajak yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25	
Melakukan pengawasan pembayaran Bea Meterai dan pengawasan setoran Bendaharawan Pemerintah	
meningkatkan pemanfaatan dan tindak lanjut alket melalui kegiatan KPDL	
Melakukan pendekatan dan menghimbau Wajib Pajak baru hasil DSE agar melakukan setoran pajak di tahun berjalan	

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	107,24%	116,51%	116,51%	118,47%	118,47%	117,88%	117,88%
Capaian	120	145,64	145,64	131,63	131,63	117,88	117,88

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimalMaterial dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan Target Wajib

Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), Wajib Pajak Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

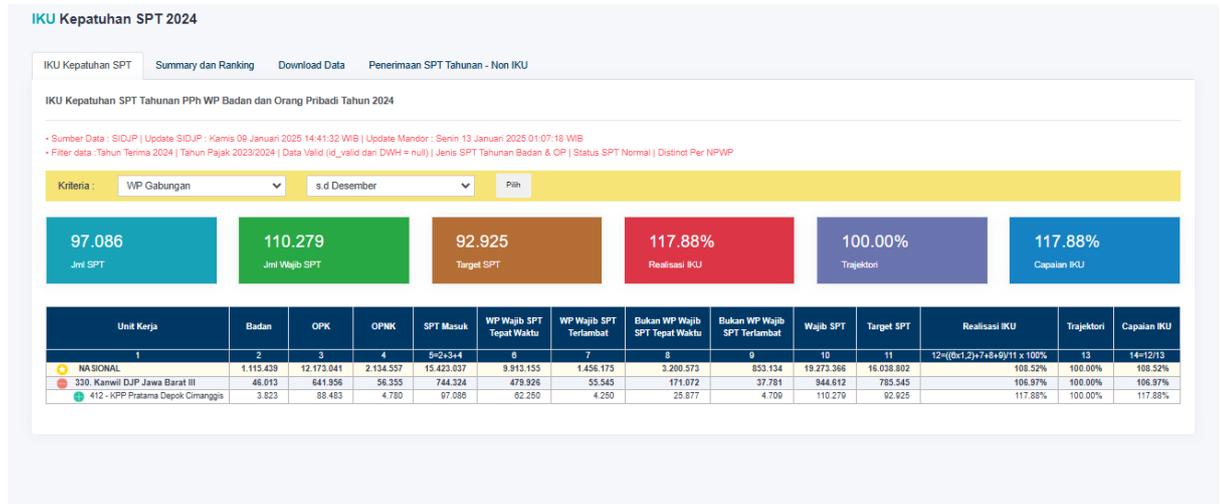
- a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2
- b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU



Sumber: Mandor DJP

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi capaian sebesar 117,88% dengan target SPT 92.925 dari total jumlah wajib SPT 110.279 dan realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi senilai 97.086.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	95,12%	102,13%	107,31%	117,88%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 yaitu 117,88%. Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	117,88%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat pada target dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dan RPJMN. Tercapainya target IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	117,88%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan peningkatan di setiap tahun nya, hal ini diiringi dengan semakin meningkatnya Tingkat kesadaran kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak atas kinerja organisasi.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan cleansing data atas Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kewajiban pajak objektif. Pembukaan pojok pajak yang berkerja sama dengan Pemerintah;
 - b. Pembuatan peta kepatuhan, untuk penyusunan fokus tempat sosialisasi dan pengawasan;
 - c. Membuat Tim penerimaan SPT dan penugasan yang melibatkan seluruh pegawai;
 - d. Menghimbau pemberi Kerja untuk mengingatkan pegawai menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dengan memberikan daftar nama pegawai yang belum melaporkan SPT Tahunan;
 - e. Mengirim SMS / WA Blast kepada Wajib Pajak;
 - f. Mengoptimalkan media sosial dan podcast;
 - g. Pembukaan pojok pajak yang berkerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat;
 - h. Mengimbau pemberi kerja agar segera membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan menyampaikan ke pegawai agar segera melaporkan SPT tahunan OP secara tepat waktu via *e-filing*
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Secara umum didorong oleh meningkatnya tingkat kesadaran kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajak nya dan meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak atas kinerja organisasi.
 - b. Pendorong penurunan realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil dilampaui dan menunjukkan peningkatan di setiap tahun nya.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- b. Membuat Tim penerimaan SPT dan penugasan yang melibatkan seluruh pegawai;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis;

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemberi Kerja dalam rangka meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan PPh OP Karyawan;
- b. Melakukan pendampingan pelaporan SPT Tahunan baik untuk Wajib Pajak yang diundang datang maupun kunjungan ke lokasi Wajib Pajak;
- c. Pembukaan pojok pajak yang berkerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Tax Center Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia terkait program relawan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi capaian atas kinerja kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan informasi terkait penyampaian SPT Tahunan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu Melakukan Sosialisasi/kerja sama dengan para pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan besar dan Sosialisasi Penyampaian SPT kepada Wajib Pajak melalui daring.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi capaian atas kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara umum didorong oleh meningkatnya tingkat kesadaran kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya dan meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan cleansing data atas Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kewajiban pajak objektif. Pembukaan pojok pajak yang berkerja sama dengan Pemerintah;
- b. Pembuatan peta kepatuhan, untuk penyusunan fokus tempat sosialisasi dan pengawasan;
- c. Membuat Tim penerimaan SPT dan penugasan yang melibatkan seluruh pegawai;
- d. Menghimbau pemberi Kerja untuk mengingatkan pegawai menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dengan memberikan daftar nama pegawai yang belum melaporkan SPT Tahunan;
- e. Mengirim SMS / WA Blast kepada Wajib Pajak;
- f. Mengoptimalkan media sosial dan podcast;
- g. Pembukaan pojok pajak yang berkerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat;

h. Mengimbau pemberi kerja agar segera membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan menyampaikan ke pegawai agar segera melaporkan SPT tahunan OP secara tepat waktu via *e-filing*.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melanjutkan melakukan cleansing data atas Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kewajiban pajak objektif	2025
Melakukan evaluasi atas peta kepatuhan, untuk penyusunan fokus tempat sosialisasi dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak	

Meningkatkan Koordinasi dengan Pemberi Kerja dalam rangka meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan PPh OP Karyawan	
Pengiriman SMS Blast pada Wajib Pajak Wajib SPT yang belum lapor serta optimalisasi medsos KPP dalam rangka peningkatan kepatuhan	
Meningkatkan edukasi kepada Wajib Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan	
Melakukan pendampingan pelaporan SPT Tahunan baik untuk Wajib Pajak yang diundang datang maupun kunjungan ke lokasi Wajib Pajak	
Pembuatan laporan pemantauan capaian SPT per <i>Account Representative</i>	

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	15,75%	24,53%	24,53%	32,55%	32,55%	100,07%	100,07%
Capaian	63	49,06	49,06	43,40	43,40	100,07	100,07

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

A. Target s.d. Desember 2024	1.411.633.787.000
1. PPM	1.327.169.982.000
2. PKM	84.463.805.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024	1.411.630.237.439
1. PPM	1.327.109.026.522
2. PKM	84.521.210.917
Capaian Penerimaan	100,00 %
Capaian PPM	100,00 %
Capaian PKM	100,07 %
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024	(3.549.561)
1. PPM	(60.955.478)
2. PKM	57.405.917

Sumber: Aplikasi DRM DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi DRM DJP, Capaian IKU untuk Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100,07% dengan realisasi senilai Rp. 84.521.210.917 sesuai dengan target senilai Rp. 84.463.805.000.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	125,13%	111,68%	62,28%	100,07%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100,07%. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional,

peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,07%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS Kanwil dalam upaya konseling kegiatan pengawasan dan penagihan pajak;
2. Meningkatnya kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penagihan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,07%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin

terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

Membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 dikarenakan Pengawasan Tindaklanjut Penerimaan dari Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah dilakukan unit kerja dengan maksimal.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan penelitian awal atas data pemicu dan/atau data penguji yang tersedia;
- b. Melakukan penyusunan DPP dan DSPP berdasarkan data yang telah diturunkan dan analisis mandiri;
- c. Menindaklanjuti SP2DK DPP yang telah di terbitkan dan SP2DK Outstanding 2024 dengan kegiatan konseling dan visit Wajib Pajak;
- d. Melakukan kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS dalam rangka konseling;
- e. Menindaklanjuti SP2DK (FP Terbit Tidak Lapor) dengan melakukan pemeriksaan data konkret yang berkualitas;
- f. Melakukan tindak lanjut terhadap ketetapan-ketetapan yang akan daluwarsa untuk dilakukan penagihan secara prioritas;
- g. Membuat surat panggilan konseling WP untuk penyelesaian utang pajak;
- h. Percepatan penyelesaian pemeriksaan LB dan Rutin dan mendorong pemanfaatan Per-05, agar tersedia ruang dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan SP2 pemeriksaan khusus

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penerimaan pajak dari Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penerimaan pajak dari Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
 3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
 5. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 3. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 4. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- a. Melakukan penelitian awal atas data pemicu dan/atau data penguji yang tersedia;
- b. Melakukan penyusunan DPP dan DSPP berdasarkan data yang telah diturunkan dan analisis mandiri;
- c. Menindaklanjuti SP2DK DPP yang telah di terbitkan dan SP2DK Outstanding 2024 dengan kegiatan konseling dan visit Wajib Pajak;
- d. Melakukan kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS dalam rangka konseling;
- e. Menindaklanjuti SP2DK (FP Terbit Tidak Lapor) dengan melakukan pemeriksaan data konkret yang berkualitas;
- f. Melakukan tindak lanjut terhadap ketetapan-ketetapan yang akan daluwarsa untuk dilakukan penagihan secara prioritas;
- g. Membuat surat panggilan konseling WP untuk penyelesaian utang pajak;
- h. Percepatan penyelesaian pemeriksaan LB dan Rutin dan mendorong pemanfaatan Per-05, agar tersedia ruang dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan SP2 pemeriksaan khusus

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak lainnya (berbasis kewilayahan) yang dilakukan oleh *Account Representative*. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu melakukan kunjungan langsung ke tempat Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain karena tindak lanjut SP2DK DPP maupun Outstanding belum optimal hal ini diatasi dengan:

- a. Melakukan penelitian awal atas data pemicu dan/atau data penguji yang tersedia;
- b. Melakukan penyusunan DPP dan DSPP berdasarkan data yang telah diturunkan dan analisis mandiri;
- c. Menindaklanjuti SP2DK DPP yang telah di terbitkan dan SP2DK Outstanding 2024 dengan kegiatan konseling dan visit Wajib Pajak;
- d. Melakukan kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS dalam rangka konseling;
- e. Menindaklanjuti SP2DK (FP Terbit Tidak Lapor) dengan melakukan pemeriksaan data konkret yang berkualitas;
- f. Melakukan tindak lanjut terhadap ketetapan-ketetapan yang akan daluwarsa untuk dilakukan penagihan secara prioritas;
- g. Membuat surat panggilan konseling WP untuk penyelesaian utang pajak;
- h. Percepatan penyelesaian pemeriksaan LB dan Rutin dan mendorong pemanfaatan Per-05, agar tersedia ruang dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan SP2 pemeriksaan khusus.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengoptimalkan penelitian awal atas data pemicu dan/atau data pengujian yang tersedia, dengan memanfaatkan CRM IRE dan data lainnya	2025
Membuat DPP dan DSPP yang berkualitas, dengan memanfaatkan kegiatan bedah WP, analisis laporan keuangan dan WP sektor dominan	
Percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding dan SP2DK DPP yang belum LHP2DK melalui kegiatan konseling dan visit Wajib Pajak	
Memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar LHP2DK dengan status "dalam pengawasan" yang memiliki potensi agar segera direalisasikan	
Memantau setoran Wajib Pajak sesuai dengan BA komitmen yang dibuat	

Meningkatkan kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS Kanwil dalam upaya konseling kegiatan pengawasan dan penagihan pajak	
Meningkatkan kegiatan tindak lanjut terhadap ketetapan-ketetapan yang akan daluwarsa untuk dilakukan penagihan secara prioritas	
Meningkatkan pembuatan surat himbauan untuk penyelesaian utang pajak	
Melakukan pemeriksaan data konkret yang berkualitas dan mengusulkan pemeriksaan khusus dari kegiatan pengawasan	

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60	60	74%	74%
Realisasi	15,53%	41,59%	41,59%	86,60%	86,60%	88,8%	88,8%
Capaian	120	103,98	103,98	144,33	144,33	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak;
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak;
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU**

Dashboard Penyuluhan													Elio Pandoyo Wisnu Bawono							
Dashboard Utama													Data Unit Kerja		Detail Data		Panduan		Penyuluhan 2023	
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress										
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU											
		Capaian	Rasio (16,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)								
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
412	PRATAMA DEPOK CIMANGGIS	100.00 %	18.50 %	71.82 %	28.12 %	64.55 %	42.18 %	88.80 %	99.16 %	119.89 %	120.00 %	120.00 %								
4306060000	KPP Pratama Depok Cimanggis	100.00 %	18.50 %	71.82 %	28.12 %	64.55 %	42.18 %	88.80 %	99.16 %	119.89 %	120.00 %	120.00 %								

Sumber: Mandor DJP

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai realisasi senilai 88,80% melebihi target yang telah ditentukan yaitu 74%. Perubahan perilaku lapor mencapai 71,82% dari rasio 28,12% dan perubahan perilaku bayar mencapai 64,55% dari rasio 42,18%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	-	-	-	84%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mengalami peningkatan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 120%. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	-	-	84%	120%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak terdapat pada target dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dan RPJMN. Tercapainya Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan tingginya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100%	-	120%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tidak termasuk dalam standar nasional APBN. Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 senilai 120%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pojok pajak yang bekerja sama dengan pemerintah/lembaga daerah setempat;
- b. Pelaksanaan kelas pajak bagi Wajib Pajak;
- c. Pemanfaatan ruang podcast dalam rangka edukasi Wajib Pajak;
- d. Penyuluhan Wajib Pajak tematik.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Secara umum didorong oleh meningkatnya tingkat kesadaran kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya dan meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak atas kinerja organisasi;
- b. Pendorong penurunan realisasi capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajibannya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

- a. Penyelenggaraan pojok pajak yang bekerja sama dengan pemerintah/lembaga daerah setempat;
- b. Pelaksanaan kelas pajak bagi Wajib Pajak;
- c. Pemanfaatan ruang podcast dalam rangka edukasi Wajib Pajak;
- d. Penyuluhan Wajib Pajak tematik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat kelompok penyuluh pajak non fungsional;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;

d. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- b. Meningkatkan sinergi dengan Tax Center Universitas Gunadarma terkait sosialisasi di bidang perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya dan Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan penyuluhan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu membuat kelas pajak, pajak bertutur, Pembentukan tim sosial media untuk pembuatan konten kreatif, sosialisasi melalui media publikasi terkait dengan pajak dan menyebarkan informasi perpajakan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya, diatasi dengan:

- a. penyelenggaraan pojok pajak yang bekerja sama dengan pemerintah/lembaga daerah setempat;
- b. Pelaksanaan kelas pajak bagi Wajib Pajak;
- c. Pemanfaatan ruang podcast dalam rangka edukasi Wajib Pajak;
- d. Penyuluhan Wajib Pajak tematik.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Penyelenggaraan pojok pajak yang bekerja sama dengan pemerintah/lembaga daerah setempat	2025
Meningkatkan pelaksanaan kelas pajak bagi Wajib Pajak	
Pemanfaatan ruang podcast dalam rangka edukasi Wajib Pajak	
Meningkatkan penyuluhan Wajib Pajak tematik yang disesuaikan dengan sektor dominan unit kerja	
Memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyuluhan perpajakan terbaru.	

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	78%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	97,25%	12,58%	12,58%	18%	18%	109,53%	109,53%
Capaian	120	125,8	125,8	120	120	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian

Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur: tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,53	Max	E/M	21%	50,00%	109,53

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan senilai 109,53 melebihi target yang telah ditentukan yaitu 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	109,53

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 109,53. Hal ini didorong oleh meningkatnya tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	100	100	100

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Tercapainya indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan didorong oleh meningkatnya tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100	100	100

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Realisasi capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 109,53. Hal ini didorong oleh meningkatnya tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada setiap Wajib Pajak yang memerlukan pelayanan perpajakan;
- Membantu setiap permasalahan yang dialami Wajib Pajak melalui layanan konseling dan penyuluhan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
Secara umum didorong oleh meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak atas kinerja organisasi;
- b. Pendorong penurunan realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah:

- a. Memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada setiap Wajib Pajak yang memerlukan pelayanan perpajakan;
- b. Membantu setiap permasalahan yang dialami Wajib Pajak melalui layanan konseling dan penyuluhan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat kelompok penyuluh pajak non fungsional;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- b. Meningkatkan sinergi dengan Tax Center Universitas Gunadarma terkait sosialisasi di bidang perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh

organisasi yaitu membantu setiap permasalahan yang dialami Wajib Pajak melalui layanan konseling dan penyuluhan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya, diatasi dengan :

- a. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- b. Meningkatkan sinergi dengan Tax Center Universitas Gunadarma terkait sosialisasi di bidang perpajakan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada setiap Wajib Pajak yang memerlukan pelayanan perpajakan	2025
Membantu setiap permasalahan yang dialami Wajib Pajak melalui layanan konseling dan penyuluhan	

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	98,12%	98,12%	113,40%	113,40%
Capaian	120	120	120	109,2	109,2	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti adalah: jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa, atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan, atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan

pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c. Jumlah daftar nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 -) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 -) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 -) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 -) triwulan IV: sampai dengan bulan November;
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase penelitian kenaikan angsuran pph pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian dan 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 -) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 -) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 -) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian dan 40% untuk Kualitas Penelitian;
4. Pda kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

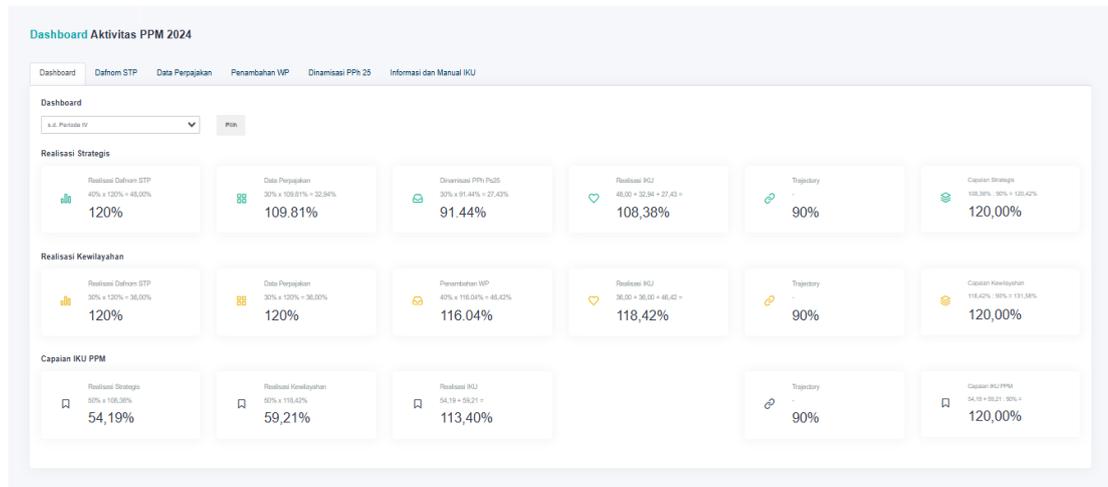
1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah daftar nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 -) triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 -) triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 -) triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 -) triwulan IV: sampai dengan bulan November;
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak;
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan

- **Realisasi IKU**



Sumber: Mandor DJP

Realisasi capaian persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 113,40 % dengan target 90% sehingga indeks capaian yang didapat atas pengawasan pembayaran masa adalah 120, dengan rincian realisasi iku strategis 108,38% dengan target 90% sehingga indeks capaian yang didapat adalah 120, rincian realisasi iku kewilayahan 118,42% dengan target 90% sehingga indeks capaian yang didapat adalah 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	104,46%	106,79%	113,40%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100%. Capaian pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	113,40%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tercapainya target IKU persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM;
2. Meningkatnya capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	113,40%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

Membaiknya kinerja pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 dikarenakan pengawasan tindaklanjut penerimaan dari kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan tindaklanjut penerimaan dari kegiatan pengawasan kepatuhan material telah dilakukan unit kerja dengan maksimal.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang ada di aplikasi DSTP-approweb;

- b. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25;
- c. Menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan;
- d. Menindaklanjuti Data DSE yang telah diturunkan;
- e. Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) sebagai salah satu sumber untuk kegiatan penambahan WP baru

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa
Capaian signifikan pengawasan pembayaran masa secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN;
 - 3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - 5. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

- b. Pendorong penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa
Meskipun target kinerja pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - 3. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid 19; dan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi kinerja pengawasan pembayaran masa adalah:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang ada di aplikasi DSTP-approweb;
- b. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25;
- c. Menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan;
- d. Menindaklanjuti Data DSE yang telah diturunkan;
- e. Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) sebagai salah satu sumber untuk kegiatan penambahan Wajib Pajak baru

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu dengan optimalisasi fungsi analisis data dan potensi pajak antara seksi Pengawasan dan Juru Sita dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang ada di aplikasi DSTP-approweb;
- b. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25;
- c. Menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan;
- d. Menindaklanjuti Data DSE yang telah diturunkan;
- e. Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) sebagai salah satu sumber untuk kegiatan penambahan Wajib Pajak baru

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Memonitor dan menindaklanjuti data pemicu yang turun pada tahun berjalan pada aplikasi Approweb secara periodik	2025
Memonitor dan menindaklanjuti daftar nominatif STP yang diturunkan pada tahun berjalan untuk diterbitkan STP secara periodik	
Menghitung analisis angsuran PPh Pasal 25 dan melakukan pendekatan kepada WP yang dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25	
Melakukan optimalisasi bahan KPDL untuk mengantisipasi kurangnya bahan DSE dari Kantor Pusat	
Menindaklanjuti Data DSE yang telah diturunkan dengan penerbitan SP2DKE, visit dan penerbitan LHP2DKE	
Menindaklanjuti WP hasil Ekstensifikasi dengan melakukan imbauan dan pemberian edukasi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya	

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	0%	120%	120%	109,11%	109,11%	115,07%	115,07%
Capaian	0	120	120	109,11	109,11	115,07	115,07

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- A. Komponen Penelitian:**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPT) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPT tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis.

- B. Komponen Tindak Lanjut:**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan

(DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan):

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas:

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%)

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

- a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

B. Komponen Kualitas:

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

- a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
- b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
- c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

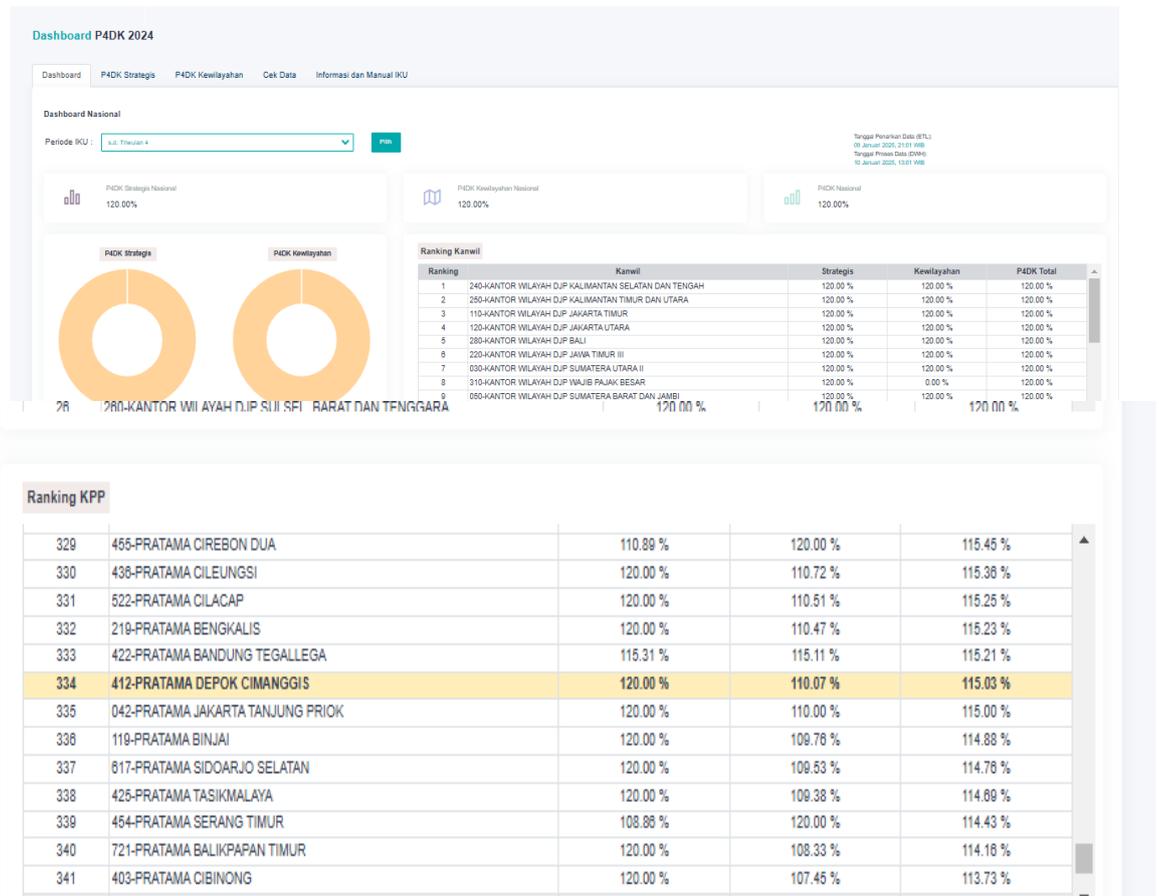
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis			=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%					
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024			x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis				
Maksimal 120%					
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis			x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis				
Maksimal 120%					
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)			=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%					
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)				
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas			x 100%	
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas				

• **Realisasi IKU**



Sumber: Mandor DJP

Realisasi capaian persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 115,03 % dengan target 100%, dengan rincian realisasi iku strategis 120% dan realisasi iku kewilayahan 110,07%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106,29%	110,15%	117,25%	120%	115,07%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100%. Capaian pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	115,07%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM;
2. Meningkatnya capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	115,07%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025 dan Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 dikarenakan *Account Representative* telah bekerja semaksimal mungkin dengan melakukan visit atau kunjungan langsung ke tempat Wajib pajak secara berkala.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pemanfaatan data di approweb, appportal, MPN-Info, dan data kanwil/kanpus melalui penerbitan SP2DK yang telah diusulkan dalam DPP;
- Melakukan tindak lanjut SP2DK outstanding dan SP2DK DPP yang telah diterbitkan, melalui kegiatan konseling dan visit Wajib Pajak;
- Melakukan kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS Kanwil dalam prangka penyelesaian SP2DK Outstanding dan SP2DK DPP;
- Memonitor setoran WP yang sudah berkomitmen hasil dari kegiatan konseling yang telah dilaksanakan;
- Sinergi dengan Seksi P3 terkait dengan penerbitan SP2 WP yang akan dilakukan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Data Konkret

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain :

- Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Capaian signifikan pengawasan capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

2. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 3. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Meskipun target kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 3. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid 19; dan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

- a. Pemanfaatan data di approweb, appportal, MPN-Info, dan data kanwil/kanpus melalui penerbitan SP2DK yang telah diusulkan dalam DPP;
- b. Melakukan tindak lanjut SP2DK outstanding dan SP2DK DPP yang telah diterbitkan, melalui kegiatan konseling dan visit Wajib Pajak;
- c. Melakukan kegiatan kolaborasi dengan FPP KPP dan PPNS Kanwil dalam prangka penyelesaian SP2DK Outstanding dan SP2DK DPP;
- d. Memonitor setoran WP yang sudah berkomitmen hasil dari kegiatan konseling yang telah dilaksanakan;
- e. Sinergi dengan Seksi P3 terkait dengan penerbitan SP2 WP yang akan dilakukan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Data Konkret

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- b. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui In House Training, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu dengan melakukan sinergi dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan terkait dengan penerbitan SP2 WP yang akan dilakukan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Data Konkret.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan bukan tanpa kendala, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP yang ada di aplikasi DSTP-approweb;
 - b. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25;
 - c. Menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan;
 - d. Menindaklanjuti Data DSE yang telah diturunkan;
 - e. Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) sebagai salah satu sumber untuk kegiatan penambahan Wajib Pajak baru
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi Masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Selektif dalam menentukan Wajib Pajak untuk usulan DPP	2025
Memanfaatkan data rekomendasi DPP dari Kanwil dan Kantor Pusat dengan telah dilakukan penelitian terlebih dahulu	
Memanfaatkan Approweb dalam pengawasan Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan status belum ditindaklanjuti	
Meningkatkan kegiatan konseling dan visit atas SP2DK Outstanding dan SP2DK DPP	
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut penerbitan SP2DK dan LHP2DK	
Kolaborasi dengan PPNS Kanwil	
Memantau setoran WP yang sudah berkomitmen belalui BAP2DK	
Melakukan kunjungan ke Wajib Pajak	
Melakukan pemanggilan/konseling ke Wajib Pajak	
Memonitor kode billing yang telah dibuat pada aplikasi apportal	

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	113,54%	113,54%	114,82%	114,82%	119,83%	119,83%
Capaian	120	113,54	113,54	114,82	114,82	119,83	119,83

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *matching*. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti sedangkan pemanfaatan data *matching* Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan), memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak), memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024, tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024, tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), dan yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Penanfaatan Data *Matching* :

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1	436. PRATAMA CILEUNGSI	120,00 %	120,00 %	120,00 %
2	412. PRATAMA DEPOK CIMANGGIS	120,00 %	120,00 %	120,00 %
3	404. PRATAMA BOGOR	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4	447. PRATAMA PONDOK GEDE	120,00 %	120,00 %	120,00 %
5	448. PRATAMA DEPOK SAWANGAN	120,00 %	119,79 %	119,89 %
6	407. PRATAMA BEKASI UTARA	120,00 %	119,51 %	119,76 %
7	458. MADYA KOTA BEKASI	114,34 %	120,00 %	117,17 %
8	449. MADYA BOGOR	111,76 %	120,00 %	115,88 %
9	403. PRATAMA CIBINONG	109,64 %	120,00 %	114,82 %
10	434. PRATAMA CIAWI	75,84 %	120,00 %	97,92 %
11	427. PRATAMA BEKASI BARAT	74,67 %	120,00 %	97,44 %

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, Capaian IKU untuk pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120% dengan komposisi realisasi STP dan data *matching* yang mencapai 120%. Namun data capaian yang digunakan untuk realisasi Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV menggunakan data *generate* pada *Dashboard* Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP yaitu sebesar 119,83%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,83%

IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mulai ada sejak tahun kinerja 2023. Pada tahun 2023 realisasi untuk IKU ini sebesar 120% sedangkan pada tahun 2024 menjadi 119,83 berdasarkan pada data *generate* pada *dashboard* Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119,83%

IKU Persentasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 tidak termasuk dalam IKU pada Renja, Renstra DJP maupun RPJMN. Tercapainya target IKU pada tahun 2024 dikarenakan seluruh daftar nominatif wajib pajak yang harus diterbitkan STP pada aplikasi approweb telah ditindaklanjuti. Selain itu KPP Pratama Depok Cimanggis telah menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan dengan prioritas pada nilai yang signifikan serta memanfaatkan data pemicu yang masuk dalam DSP4 kolaboratif sebagai bahan usulan DPP. Pemanfaatan data yang tersedia sudah dilakukan secara maksimal sejak pada triwulan pertama dan terus dilakukan secara konsisten pada triwulan-triwulan berikutnya sehingga pada akhir tahun realisasi IKU tercapai secara maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	119,83%

Pemanfaatan data selain tahun berjalan pada akhir tahun 2024 mampu melewati target yang ditetapkan. Hal ini diiringi dengan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat sehingga seluruh upaya dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan dashboard pada Aplikasi Mandor DJP untuk tahun 2024 KPP Depok Cimanggis menduduki posisi kedua pada lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dengan realisasi pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data *Matching* masing-masing 120%. Dengan memaksimalkan capaian IKU ini juga menjadi bahan baku bagi penerimaan pajak KPP Pratama Depok Cimanggis.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk menunjang capaian kinerja atas IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatkan kegiatan identifikasi dan tindak lanjut data pemicu di luar tahun berjalan yang harus diselesaikan pada aplikasi;
 - Meningkatkan kegiatan identifikasi dan tindak lanjut dafnom STP diluar tahun berjalan yang harus diselesaikan;
 - Melakukan kunjungan ke WP dalam rangka memastikan eksistensi keberadaan dan kegiatan usaha WP;
 - Menindaklanjuti DPP baik DPP Mandatory maupun DPP Kolaboratif semester I dan semester II.
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan tercapainya IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, seperti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas tindak lanjut data STP dan data *matching*, mempercepat penerbitan STP atas ketidakpatuhan wajib pajak yang terdapat pada daftar nominatif maupun maupun yang diluar daftar nominatif sehingga pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2024 realisasi IKU selalu melebihi target yang ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- b. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian IKU tidak terdapat kendala yang signifikan namun alangkah lebih baiknya apabila data yang diturunkan dapat secara *realtime*. Melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin baik oleh masing-masing Kepala Seksi maupun pengawasan langsung dari Kepala KPP Pratama Depok Cimanggis sehingga capaian IKU dapat tercapai secara konsisten sejak awal tahun.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan tahun ini sehingga upaya-upaya tersebut terus diterapkan dan dapat dijadikan acuan agar terhindar dari risiko. Atas rencana-rencana aksi yang sudah disusun pada periode sebelumnya terus dipertahankan sehingga. Sebagai bentuk mitigasi, seluruh daftar nominatif harus ditindaklanjuti sesuai dengan *time line* yang sudah ditetapkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sudah tercapai secara maksimal, dan tidak terdapat kendala yang signifikan. Agar proses tindak lanjut dapat berjalan lebih efisien sebaiknya data yang diturunkan melalui Aproweb dapat lebih *realtime*.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Data yang ditindaklanjuti akan menghasilkan nilai potensi pajak. Potensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses pengawasan dan/atau penagihan kepada wajib pajak. APBN yang berasal dari penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*, membangun fasilitas ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan memiliki peran penting dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak dan APBN.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menertbitkan STP selain tahun berjalan sesuai dengan daftar nominative; Menindaklanjuti data <i>matching</i> dan data pemicu untuk segera dibuat LHPt dan SP2DK; Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala pada setiap <i>Account Representative</i>; Melakukan kunjungan ke WP dalam rangka memastikan eksistensi keberadaan dan kegiatan usaha wajib pajak. 	2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi							
Capaian							

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Sebagai komponen yang kedua, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Selain itu, sebagai komponen yang ketiga yaitu penyiapan bahan baku dalam bentuk DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu :

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	+	40% Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	+	30% Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan
--	---	---	---	---

- **Realisasi IKU**

NO	KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	INDIKATOR 3 (BOBOT 30%)		REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
						TARGET	CAPAIAN	
343	06c-N	330	412	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	PRATAMA DEPOK CIMANGGIS	55,00%	120,00%	101,29%

Sumber: Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-2117/PJ.08/2024

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan selaku Ketua Pelaksana Harian Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP nomor ND-2117/PJ.08/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Penyampaian Ketentuan dan Format Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP, untuk nilai capaian realisasi IKU Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Depok Cimanggis sebesar 101,29%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu	-	-	-		101,29%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu merupakan IKU baru pada tahun kinerja 2024, sehingga tidak memiliki data historis. Pada tahun 2024 realisasi capaian efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,29%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu	-	-	100%	101,29%

IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material berjalan dengan optimal. Seluruh komponen pembentuk IKU sudah terlaksana dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu	100%	-	101,29%

Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak tepat waktu pada akhir tahun 2024 mampu melewati target yang telah ditetapkan. Hal ini diiringi dengan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat sehingga komponen-komponen seperti laporan pelaksanaan tugas, kualitas pelaksanaan yang diukur melalui realisasi nilai PKM, dan penyiapan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP dapat membentuk nilai efektivitas yang baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk menunjang capaian kinerja atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan secara tepat waktu;
- b. Meningkatkan kegiatan pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan secara optimal sehingga realisasi untuk penerimaan PKM dapat tercapai;
- c. Menjaga konsistensi terkait penyiapan bahan baku pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu diantaranya adalah:

- a. Menyelenggarakan rapat komite kepatuhan dan mengevaluasi kinerja komite kepatuhan;
- b. Memastikan setiap komponen terlaksana dengan baik;
- c. Mengoptimalkan kegiatan penggalian potensi, penagihan pajak serta penyelesaian atas pemeriksaan berdasarkan DSPP;
- d. Melakukan kordinasi secara intensif untuk mempersiapkan bahan baku pemeriksaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- b. Didukung oleh teknologi dan informasi yang telah terintegrasi;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis.
- d. Melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk kegiatan visit kepada wajib dalam proses pengawasan/penggalian potensi, kegiatan penagihan pajak, dan kegiatan lain yang menunjang tercapainya IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu pada tahun 2024 merupakan hasil dan upaya dari kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun. Melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin membantu untuk mencapai target IKU. Komponen terbesar dalam formula IKU merupakan kualitas pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 40%

dan dibuktikan berdasarkan nilai realisasi capaian PKM sehingga kegiatan penunjang yang dilakukan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan DPP dan DSPP berdasarkan data yang telah diturunkan maupun melalui analisis mandiri;
- b. Menindaklanjuti SP2DK DPP maupun *outstanding* dengan melakukan konseling, visit kepada wajib pajak dan melakukan kolaborasi dengan Pemeriksa Pajak;
- c. Melakukan tindak lanjut terhadap ketetapan yang akan daluarsa untuk dilakukan penagihan secara prioritas;
- d. Percepatan pemeriksaan Lebih Bayar maupun pemeriksaan rutin agar tersedia ruang dan waktu untuk menyelesaikan SP2 pemeriksaan khusus.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu merupakan kriteria IKU baru sehingga tidak memiliki data historis. Meskipun tergolong kriteria IKU baru, namun beberapa komponen IKU ini terintegrasi dengan IKU realisasi penerimaan PKM sebagai komponen kualitas sehingga rencana aksi pada periode sebelumnya pada IKU realisasi PKM masih berkaitan dengan tahun ini sehingga upaya-upaya tersebut terus diterapkan dan dapat dijadikan acuan agar terhindar dari risiko pada tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi atas efektivitas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Depok Cimanggis adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan sampai dengan triwulan III belum dilakukan secara optimal;
- b. Masih rendahnya kemampuan bayar WP atas ketetapan pajak;
- c. Komposisi piutang pajak sebagian besar berstatus macet;
- d. Jumlah SDM pemeriksa belum sesuai dengan kebutuhan organisasi;

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Melalui pengelolaan dana APBN, pemerintah dapat melaksanakan program-program khusus, membangun fasilitas, dan menetapkan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut Efektivitas Komite Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran penting dalam memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU Efektivitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan Tepat Waktu memiliki peran penting dalam upaya mengamankan penerimaan pajak melalui kegiatan-kegiatan pengawasan kepatuhan material dengan tujuan utamanya mencapai realisasi penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan dan memantau Laporan Komite Kepatuhan setiap triwulan agar disampaikan secara tepat waktu sebelum jatuh tempo; Meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan untuk mencapai realisasi penerimaan PKM; Menjaga konsistensi terkait penyiapan bahan baku pemeriksaan. 	2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,36%	66,30%	66,30%	120%	120%	120%	120%
Capaian	98,36	66,30	66,30	120	120	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

- Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

- **Realisasi IKU**

7	Penegakan hukum yang efektif							118,47
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,86%	Max	P/L	19,00%	36,54%	115,61
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai 120%. Meskipun KPP Pratama Depok Cimanggis tidak memiliki Fungsional Penilai namun telah ditunjuk pegawai pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan sebagai Petugas Penilai sehingga untuk komponen efektivitas penilaian masih dapat berjalan dengan optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian berdasarkan manual IKU merupakan IKU baru pada tahun kinerja 2024, sehingga tidak memiliki data historis. Pada tahun 2024 realisasi capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	120%

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga seluruh komponen baik pemeriksaan maupun penagihan dapat mencapai nilai maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	120%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 Hal ini diiringi dengan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat sehingga komponen-komponen seperti laporan pelaksanaan tugas, kualitas pelaksanaan yang diukur melalui realisasi nilai PKM, dan penyiapan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP dapat membentuk nilai efektivitas yang baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mencapai IKU KPP Pratama Depok Cimanggis melakukan beberapa langkah penunjang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Merupakan percepatan penyelesaian pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar;
- Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan;
- Melakukan monitoring terhadap daftar jatuh tempo pemeriksaan;
- Melakukan monitoring atas SPT LB yang belum diusulkan pemeriksaan;
- Melakukan kegiatan penilaian untuk properti kriteria.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan atas pencapaian target tidak luput dari komitmen seluruh aktor yang terlibat. Dalam proses mencapai efektivitas pemeriksaan, pemeriksa membuat *audit plan* berkualitas yang komperhensif, menyelesaikan segera tunggakan pemeriksaan agar dapat menambah ruang terbit UP2 dan berkordinasi dengan Seki Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. Untuk mencapai realisasi pada efektivitas penagihan diperlukan kegiatan penilaian yang ditugaskan pada satu orang petugas

penilai dengan kegiatan penilaian yang terbatas yaitu pada penilaian property kriteria satu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- c. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- d. Didukung oleh teknologi dan informasi yang telah terintegrasi;
- e. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis;
- f. Untuk menunjang kegiatan penilaian telah ditunjuk pegawai yang ditugaskan sebagai petugas penilai dengan latar belakang Pendidikan terakhir adalah Diploma III penilaian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian IKU tidak terdapat kendala yang signifikan namun alangkah lebih baiknya apabila data yang diturunkan dapat secara *realtime*. Melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin baik oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Supervisor, maupun pengawasan langsung dari Kepala KPP Pratama Depok Cimanggis sehingga capaian IKU dapat tercapai secara konsisten sejak awal tahun. Selain itu dilakukan koordinasi dan sinergi yang baik oleh seluruh Seksi Pengawasan untuk terus menjaga jumlah bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan tahun ini sehingga upaya-upaya tersebut terus diterapkan dan dapat dijadikan acuan agar terhindar dari risiko. Atas rencana-rencana aksi yang sudah disusun pada periode sebelumnya terus dipertahankan sehingga. Sebagai bentuk mitigasi, seluruh rencana aksi harus ditindaklanjuti sesuai dengan *time line* yang sudah ditetapkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan kinerja pada tahun 2024 meskipun realisasi dapat tercapai namun terdapat kendala yang dapat teratasi. Untuk kegiatan pemeriksaan beberapa kendala yang sering ditemukan dilapangan antara lain adalah wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksa, pada saat dilakukan visit wajib pajak tidak ditemukan, dan atas SP2 terhadap pemeriksaan wajib pajak Orang Pribadi Lebih Bayar sering kali hanya atas kesalahan pengisian SPT. Sebagai bentuk langkah tindak lanjut dilakukan sinergi dengan seksi lain agar dapat membantu wajib pajak dalam membetulkan SPT.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan yang ditindaklanjuti pada efektivitas pemeriksaan dan penilaian akan menghasilkan nilai potensi pajak. Potensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses terbitnya laporan hasil penilaian, laporan hasil pemeriksaan yang kemudian menjadi ketetapan pajak yang akan disampaikan kepada wajib pajak. Secara tidak langsung proses ini akan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. APBN yang berasal dari penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*, membangun fasilitas ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memiliki peran penting dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak dan APBN.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Audit Plan yang berkualitas dan komprehensif; • Menyelesaikan dengan segera tunggakan pemeriksaan agar dapat menambah ruang terbit UP2; • Melakukan Koordinasi dengan seksi pelayanan untuk membuat monitoring Pengawasan SPT LB; • Melakukan Koordinasi dengan seksi pengawasan dalam hal tindak lanjut penyelesaian SPT Tahunan LB; • Melaksanakan kegiatan penilaian property kriteria 1 atau kriteria lain yang ditetapkan. 	2025

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	14.00%	28.01%	28.01%	49.96%	49.96%	86.86%	86.86%
Capaian	93.33	93.37	93.37	111.02	111.02	115.81	115.81

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

Efektivitas Penagihan

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- **Realisasi IKU**

7	Penegakan hukum yang efektif								118,47
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%		120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,86%	Max	P/L	19,00%	36,54%		115,81
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%		120,00

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai 86,86% atau dengan indeks capaian 115,81. Seluruh kegiatan telah dipotimalkan melalui tiga variable utama yaitu tindakan penagihan, tindak lanjut dan pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	110,98	107,92%	80,42%	86,86%

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2024 realisasi kembali meningkat menjadi 86,86% dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga indeks capaiannya menjadi sebesar 115,81%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75%	86,86%

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat melaksanakan tugasnya secara optimal dan serangkaian proses penagihan aktif telah dilakukan sehingga seluruh komponen penagihan dapat mencapai nilai maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	-	86,86%

IKU Efektivitas merupakan IKU dengan realisasi telah mencapai target yang ditetapkan. Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 didorong melalui upaya pelaksanaan serangkaian tindakan penagihan pajak. Seluruh variabel yaitu tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC, dan pencairan DSPC telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk menunjang capaian kinerja atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menerbitkan 5383 Surat Teguran;
- Menerbitkan 3339 Surat Paksa;
- Melaksanakan 73 kali kegiatan blokir;
- Melaksanakan 14 kali penjualan barang sita;
- Melakukan *asset tracing* Wajib Pajak;
- Memanfaatkan data AtP (*Ability to Pay*) Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusli yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi pendukung keberhasilan tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penagihan seperti:

- a. Memfokuskan penerbitan Surat Teguran atas ketetapan yang sudah inkraacht;
- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak;
- c. Fokus pada *update* data DSPC untuk Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- g. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- h. Didukung oleh aplikasi dan informasi yang telah terintegrasi;
- i. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis;
- j. Penggunaan anggaran yang telah disesuaikan dengan kegiatan penagihan aktif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian IKU secara umum tidak memiliki kendala yang signifikan, dalam menunjang keberhasilan mencapai IKU sebagai upaya efektif adalah dengan melakukan kegiatan pemblokiran terhadap rekening wajib pajak. Selain itu, dilakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak dan telah dilaksanakan pula pendampingan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III dalam upaya pencairan utang pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan tahun ini sehingga upaya-upaya seperti penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, sita, dan pemblokiran terus diterapkan dan dapat dijadikan acuan agar terhindar dari risiko. Atas rencana-rencana aksi yang sudah disusun pada periode sebelumnya terus dipertahankan. Sebagai bentuk mitigasi, seluruh rencana aksi harus ditindaklanjuti sesuai dengan *time line* yang sudah ditetapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara berkala.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan kinerja pada tahun 2024 meskipun realisasi dapat tercapai namun terdapat kendala yang dapat teratasi. Adapun beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan wajib pajak untuk melunasi hutang pajak masih rendah;
- b. Penunggak pajak berstatus macet mencapai 70% dari 100 besar wajib pajak penunggak pajak;

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti**

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Variabel yang ditindaklanjuti pada efektivitas penagihan akan menghasilkan pencairan nilai potensi pajak. Potensi pajak tersebut akan ditindaklanjuti melalui serangkaian proses penagihan pajak. Secara tidak langsung proses ini akan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. APBN yang berasal dari penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*, membangun fasilitas ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan memiliki peran penting dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak sebagai sumber APBN.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tindakan penagihan (penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; • Memfokuskan penerbitan Surat Teguran atas ketetapan yang sudah <i>inkracht</i>; • Melakukan monitoring secara berkala atas penerbitan dan pemberitahuan produk hukum; • Melakukan <i>asset tracing</i> Wajib Pajak; • Melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak; • Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan; • Mereviu kembali wajib pajak yang akan ditindaklanjuti di awal tahun; • Menambah petugas juru sita pajak negara. 	2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200%	200%
Capaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

7	Penegakan hukum yang efektif							118,47
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,86%	Max	P/L	19,00%	36,54%	118,91
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realiasi atas IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai indeks 120. Melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III nomor ND-241/WPJ.33/WPJ.334/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Jawaban atas Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan bahwa jumlah usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui sejumlah 3 (tiga) usulan. Jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan (1 usulan yang disetujui).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200%

IKU Tingkat Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan manual IKU merupakan IKU baru pada tahun kinerja 2024, sehingga tidak memiliki data historis. Pada tahun 2024 realisasi capaian Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 200% dengan capaian maksimal sebesar 120.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	200%

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga terdapat 3 (tiga) usulan pemeriksaan bukti permulaan dapat disetujui.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	200%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 Hal ini diiringi dengan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat sehingga upaya-upaya yang sudah direncanakan dapat terealisasi seperti melakukan koordinasi antara Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan

Penagihan dengan seluruh Seksi Pengawasan, dan pemeriksa pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mencapai IKU KPP Pratama Depok Cimanggis melakukan beberapa langkah penunjang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh *Account Representative* mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi melakukan tindak pidana melalui SP2DK yang sudah diterbitkan dan melakukan panggilan konseling serta visit kepada wajib pajak;
 - b. Melakukan kolaborasi dengan pemeriksa pajak maupun penyidik untuk Menyusun Kertas Kerja Analisis usulan pemeriksaan bukti permulaan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan atas pencapaian target tidak luput dari komitmen seluruh aktor yang terlibat termasuk peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Upaya mengidentifikasi wajib pajak dengan pembahasan khusus dan kolaborasi dengan pemeriksa pajak maupun Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III menjadi upaya yang efektif dalam mengusulkan usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- k. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
 - l. Didukung oleh teknologi dan informasi yang telah terintegrasi;
 - m. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis;
 - n. Monitoring secara berkala melalui pembahasan khusus.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melalui proses kolaborasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dapat meningkatkan peluang usulan pemeriksaan bukti permulaan untuk disetujui. Sebelum dilakukan kolaborasi, langkah-langkah pengawasan kepada wajib pajak diperlukan secara optimal dengan data-data yang berkualitas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase penyampaian usul bukti permulaan merupakan IKU baru pada Kantor Pelayanan Pajak sehingga tidak terdapat data history pada tahun

sebelumnya. Melalui rencana aksi yang dilakukan pada tahun kinerja 2024 dapat memberi gambaran bahwa proses identifikasi wajib pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan perlu dilakukan sejak dini sehingga IKU dapat tercapai pada semester awal. Melalui kolaborasi yang pernah dijalankan juga memberi peluang lebih optimal untuk dapat menentukan wajib pajak yang akan diusulkan sehingga potensi untuk tidak disetujui menjadi berkurang.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan kinerja pada tahun 2024 meskipun realisasi dapat tercapai namun terdapat kendala sehingga IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan baru tercapai pada triwulan akhir. Kendala utama yang dihadapi adalah proses mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan yang ditindaklanjuti pada usulan pemeriksaan bukti permulaan akan menghasilkan nilai realisasi penerimaan pajak dan efek jera kepada wajib pajak. Usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. APBN yang berasal dari penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*, membangun fasilitas ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki peran penting dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak sebagai sumber APBN untuk menjalankan program pemerintah menyejahterakan Masyarakat Indonesia.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan IHT terkait IDLP dan <i>Sharing Session</i> terkait pemeriksaan Bukti Permulaan; • Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan; • Berkoordinasi dengan AR, tim pemeriksa KPP, dan kolaborasi dengan PPNS Kanwil untuk menyusun usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas 	2025

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	18.88%	45.33%	45.33%	115.04%	115.04%	120%	120%
Capaian	94.40	90.66	90.66	143.80	143.80	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan Keputusan.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU**

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan:

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU**

8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	77,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realiasi atas IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai 120%. Hal ini disebabkan kegiatan pengamatan berjalan dengan optimal dan penyediaan data potensi perpajakan di KPP Pratama Depok Cimanggis berjalan dengan lancar

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	120%	120%

IKU Tingkat Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan berdasarkan manual IKU muncul sejak tahun 2023. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan realisasi capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga seluruh komponen IKU dapat mencapai nilai maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	120%

Tercapainya IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 diiringi dengan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat sehingga komponen-komponen seperti Laporan Pengamatan dan Laporan KPDL dapat melampaui target yang sudah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mencapai IKU KPP Pratama Depok Cimanggis melakukan beberapa langkah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun SK Tim kegiatan pengamatan pada awal tahun sehingga tim dapat bergerak mulai dari awal triwulan;
- b. Memanfaatkan data faktur pajak 000 atau data lainnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
- c. Menindaklanjuti laporan KPDL melalui aplikasi SIDJP Nine;

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusli yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak luput dari usaha yang maksimal dari seluruh aktor, baik peran *Account Representative*, Seksi Penjaminan Kualitas Data, dan Komite Kepatuhan yang senantiasa terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pelaksanaan. Seluruh sumber informasi yang tersedia juga dimanfaatkan dengan optimal untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- b. Didukung oleh teknologi dan informasi yang telah terintegrasi;
- c. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis.
- d. Melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk kegiatan visit kepada wajib dalam proses pengawasan/penggalian potensi, kegiatan penagihan pajak, dan kegiatan lain yang menunjang tercapainya IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan penyisiran wilayah kerja pada masing-masing *Account Representative* dalam rangka mengidentifikasi wajib pajak baru. Selain itu, dilakukan koordinasi dan pemanfaatan data dari instansi lain seperti data ILAP untuk dijadikan sumber data KPDL. Tim pengamatan yang sudah dibentuk juga berperan penting

dalam memaksimalkan kegiatan pengamatan hingga penyampaian laporan secara tepat waktu sehingga seluruh komponen IKU dapat tercapai secara maksimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan IKU baru pada Kantor Pelayanan Pajak sehingga tidak terdapat data *history* pada tahun sebelumnya. Melalui rencana aksi yang dilakukan pada tahun kinerja 2024 dapat memberi gambaran bahwa proses identifikasi wajib pajak dan pemanfaatan data KPDL serta kegiatan pengamatan perlu dilakukan sejak dini sehingga IKU dapat tercapai pada semester awal. Melalui kolaborasi yang pernah dijalankan juga memberi peluang lebih optimal untuk dapat menghasilkan data potensi perpajakan yang berkualitas.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pada proses pencapaian IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tidak terdapat kendala yang signifikan sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan pengamatan dan pengumpulan data potensi perpajakan yang berkualitas akan diproses kelak menjadi potensi perpajakan. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi salah satu potensi sumber penerimaan pajak. APBN yang berasal dari penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*, membangun fasilitas ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki peran penting dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak sebagai sumber APBN untuk menjalankan program pemerintah menyejahterakan Masyarakat Indonesia.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan membentuk tim kegiatan pengamatan KPP Tahun 2023 melalui Keputusan Kepala Kantor; Meningkatkan koordinasi dan memanfaatkan data dari Instansi lain (misal Pemda) dalam menemukan sasaran Wajib Pajak baru; Meningkatkan penyisiran wilayah kerja masing-masing seksi pengawasan dalam rangka identifikasi potensi Wajib Pajak baru; Meningkatkan tindak lanjut data KPDL melalui aplikasi SIDJP Nine; Menentukan target, memanfaatkan data KPDL yang ada, melaksanakan pengamatan dan pembuatan laporan kegiatan pengamatan sesuai dengan tim yang telah dibentuk. 	2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	74.67%	67.67%	67.67%	77.00%	77.00%	77%	77%
Capaian	120	270.68	270.68	192.50	192.50	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- **Realisasi IKU**

8	Data dan informasi yang berkualitas								120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi nemaikan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%		120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	77,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%		120,00

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realiasi atas IKU Persentase penghimpunan data regional ILAP telah mencapai target yang ditetapkan sehingga untuk nilai indeks capaian mencapai 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	55,88%	77%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP berdasarkan manual IKU merupakan IKU yang baru sejak tahun kinerja 2023, sehingga tidak memiliki data historis lainnya. Pada tahun 2024 realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP telah melebihi target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan mendapat indeks capaian yaitu sebesar 120.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	77%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga seluruh komponen dapat mencapai nilai maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	77%

Tercapainya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun kinerja 2024 merupakan bentuk sinergi yang baik dari berbagai *stakeholder*. Pencapaian ini tidak luput dari adanya kerjasama antara KPP Pratama Depok Cimanggis, KPP Pratama Depok Sawangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, dan pemerintah daerah Kota Depok untuk menghimpun data penerimaan regional di wilayah Kota Depok.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya penting dalam mencapai IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah dengan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara KPP Pratama Depok Cimanggis dengan pemerintah daerah Kota Depok. Melalui kolaborasi yang baik, upaya mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria akan menjadi lebih mudah untuk dikomunikasikan sehingga dapat menjadi data yang berkualitas dan menghasilkan potensi penerimaan pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusli yang telah dilakukan**

Dalam mencapai IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Depok Cimanggis melakukan beberapa langkah kerja diantaranya adalah sebagai berikut:

- Berkordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Barat III terkait data ILAP yang akan ditindaklanjuti;
- Menindaklanjuti data ILAP yang diturunkan Kanwil DJP Jawa Barat III dengan tepat waktu;
- Melakukan monitoring atas pemanfaatan data ILAP terhadap masing-masing *Account Representative*;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- s. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- t. Didukung oleh teknologi dan informasi yang telah terintegrasi;
- u. Dukungan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui *In House Training*, diskusi maupun Bimbingan Teknis;

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melalui proses kolaborasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, KPP Pratama Depok Sawangan dan pemerintah Kota Depok dapat meningkatkan kualitas data ILAP yang diturunkan sehingga dapat diproses menjadi potensi pajak. Pemanfaatan data yang maksimal juga menjadi salah satu hal yang menunjang tercapainya IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun kinerja 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan tahun ini sehingga upaya-upaya penghimpunan dan pemanfaatan data ILAP terus diterapkan dan dapat dijadikan acuan agar terhindar dari risiko untuk tahun 2024.. Atas rencana-rencana aksi yang sudah disusun pada periode sebelumnya terus dipertahankan Sebagai bentuk mitigasi, seluruh rencana aksi harus ditindaklanjuti sesuai dengan *time line* yang sudah ditetapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara berkala.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan kinerja pada tahun 2024 untuk IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP tidak terdapat kendala. Pencapaian IKU tercapai dengan baik sejak triwulan I dan konsisten hingga triwulan IV. Hal ini disebabkan karena seluruh upaya dan langkah-langkah strategis sudah dijalankan dengan baik.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP akan ditindaklanjuti dengan pemanfaatan data sehingga dapat menjadi potensi pajak serta diharapkan dapat menghasilkan nilai realisasi penerimaan pajak. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. APBN yang berasal dari penerimaan pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek pemerintah dalam mendukung kesetaraan *gender*, membangun fasilitas ramah disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Meskipun IKU ini tidak secara langsung bersinggungan dengan upaya pemerintah dalam beberapa programnya namun Pencapaian IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP memiliki peran penting dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak sebagai sumber APBN untuk menjalankan program pemerintah menyejahterakan Masyarakat Indonesia.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan KPP Pratama Depok Sawangan dan Kanwil DJP Jawa Barat III; • Memanfaatkan data ILAP untuk penggalan potensi pajak; • Melakukan monitoring terhadap pemanfaatan data ILAP yang sudah diturunkan; 	2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	116.88%	116.88%
Capaian	100	100	100	100	100	116.88	116.88

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan kompetensi teknis. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis seperti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan untuk Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU**

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

- Realisasi IKU**

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,83
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,88	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,88
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,14
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,10	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,78

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realiasi atas IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai realisasi 116,88%. Hal ini menandakan bahwa seluruh kegiatan dalam komponen-komponen IKU telah dilaksanakan dengan optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,88%

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM berdasarkan manual IKU merupakan IKU baru pada tahun kinerja 2024, sehingga tidak memiliki data historis. Pada tahun 2024 realisasi capaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 116,88%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100%	116,88%

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang terlibat melaksanakan tugasnya secara optimal sehingga seluruh komponen dapat mencapai nilai maksimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	-	116,88%

Tercapainya IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun kinerja 2024 tidak terlepas dari peran penting Kepala Kantor sebagai *role model* bagi seluruh pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis. Atas komponen kualitas

kompetensi yang sudah tercapai menandakan bahwa pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki tingkat kompetensi yang baik sesuai dengan jabatannya masing-masing sedangkan untuk komponen kegiatan kebintalan menjadi gambaran bahwa Kepala Kantor sebagai pimpinan unit tertinggi memiliki peran penting menjadi motivator bagi seluruh pegawai dengan menunjukkan komitmen sebagai pimpinan, memberikan arahan dan dukungan untuk mencapai kinerja yang terbaik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Internalisasi *Corporate Value* (ICV) sebaik mungkin dan selalu melibatkan peran Kepala Kantor sebagai sinkronisasi dengan kegiatan kebintalan SDM;
 - b. Mengadakan *In House Training* (IHT) sebagai upaya *transfer of knowledge*;
 - c. Melakukan mutasi internal untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi;
 - d. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pegawai yang berpotensi mengikuti Ujian Kompetensi kenaikan jabatan untuk jabatan Fungsional Pemeriksa dan Fungsional Penyuluh;
- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki rangkaian kegiatan yang begitu banyak. Sebagai upaya meminimalisir risiko terlewat makan telah disusun jadwal pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Pada komponen kualitas kompetensi, pelaksana kepegawaian secara berkala telah melakukan monitoring daftar usulan pegawai yang berhak mengikuti uji kompetensi. Selain itu juga mendorong dan memotivasi pegawai untuk dapat meningkatkan kompetensi melalui IHT maupun *e-learning* secara mandiri. Melalui kegiatan IHT dan *e-learning* yang telah diselenggarakan juga dapat menambah capaian jam pelatihan pegawai.

Kegiatan kebintalan SDM menjadi salah satu komponen IKU pada tahun kinerja 2024. Proses untuk mencapai komponen ini seiring dengan agenda kegiatan ICV tahun 2024. Kegiatan ICV tahun 2024 dapat menjadi bagian dari kegiatan kebintalan dengan melibatkan langsung pimpinan unit kerja dalam pelaksanaannya. Kegiatan ICV yang disinkronisasikan telah mencakup 4 (empat) yaitu ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan. Setiap laporan kegiatan yang disusun triwulanan disampaikan sesuai dengan batas waktu dan bukti pendukung yang sudah ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya IKU. Adapun langkah yang telah ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan IHT, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun mengikuti kegiatan IHT yang diselenggarakan unit kerja lain;
 - b. Melaksanakan kegiatan e-learning yang telah disediakan pada laman *Kemenkeu Learning Center* (KLC) maupun laman studiA DJP;
 - c. Pelaksanaan Uji Kompetensi telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ketersediaan laptop, ruangan, jaringan, dan informasi seputar kebutuhan pembelajaran untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - d. Melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran yang dirancang untuk memenuhi seluruh kegiatan IHT maupun ICV sepanjang tahun 2024.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Prograng yang sangat menunjang keberhasilan dari pencapaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah program ICV tahun 2024. Seluruh kegiatan kebintalan dapat berjalan dengan optimal karena sejalan dengan program-program ICV. Proses pelaporan antara kegiatan ICV dan kebintalan pun memiliki periode yang sama yaitu triwulanan, sehingga untuk pelaporan kedua kegiatan tersebut cenderung dapat lebih efektif dan tidak melebihi batas waktu pelaporan. Selain itu, untuk komponen kualitas kompetensi sangat didukung dengan adanya akses terhadap *e-learning* baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui kegiatan ini seluruh pegawai dapat mengakses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dimiliki dan dapat disesuaikan dengan jenjang jabatan yang dimiliki.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis. Meskipun tergolong kriteria IKU baru, namun beberapa komponen IKU ini masih berkaitan dengan IKU tahun sebelumnya yaitu persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi. Upaya-upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai media pembelajaran terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga dapat membantu pencapaian kinerja di tahun ini. Selain itu, sebagai bentuk mitigasi pada komponen kebintalan SDM, telah disusun rencana kerja yang sejalan dengan kegiatan ICV sehingga risiko pada tahun berjalan dapat dihindari.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan proses pencapaian IKU tingkat kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDP pada tahun kinerja 2024 tidak terdapat kendala yang signifikan. Meskipun demikian, upaya untuk memitigasi tetap perlu dilakukan agar pencapaian IKU tetap tercapai secara konsisten setiap triwulan.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM menjadi IKU penunjang bagi seluruh IKU lainnya. Seluruh komponen di dalamnya akan membantu membentuk kualitas dari Sumber Daya Manusia sebagai peran utama. SDM yang berkualitas mampu menghasilkan nilai potensi dan realisasi penerimaan pajak. Pajak yang terkumpul akan menjadi kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Komponen kualitas kompetensi dan kebintalan SDM memiliki peran pendukung sebagai upaya membentuk kualitas pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki standar kompetensi tinggi. Selain itu kegiatan kebintalan mendorong pimpinan sebagai *role model* untuk tetap menjaga integritas dan memiliki karakter ASN Kementerian Keuangan yang kuat. Melalui kompetensi yang baik dan budaya kerja yang nyaman, pegawai dapat menjalankan pekerjaan penggalian potensi perpajakan dengan optimal sehingga dapat memproduksi surat himbuan maupun laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Hal tersebut dapat menjadi potensi besar pencapaian realisasi penerimaan anggaran. Secara tidak langsung perwujudan IKU ini akan memberi manfaat pada tujuan proram-program pemerintah.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan pegawai yang berpotensi naik peringkat atau naik jabatan; • Memberikan informasi yang akan naik peringkat perihal persiapan Uji Kompetensi seperti <i>e-learning</i> dan rangkuman materi; • Mengadakan IHT maupun <i>Transfer of Knowledge</i>; • Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ICV yang sudah tersinkronisasi dengan kegiatan pembinaan mental sesuai dengan <i>time line</i> yang sudah ditentukan; • Menyampaikan Laporan Pembinaan Mental secara tepat waktu 	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	-	-	85%	85%
Realisasi	-	-	-	-	-	95.32%	95.32%
Capaian	-	-	-	-	-	112.14	112.14

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu indeks pelayanan perpajakan, indeks pengawasan kepatuhan, indeks pemeriksaan pajak dan indeks penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

Indeks Penilaian Integritas Unit.

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- **Realisasi IKU**

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,93
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	116,88	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,88
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,14
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,10	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,78

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realisasi atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai realisasi 95,32% dengan indeks capaian 112,14. Hal ini menandakan bahwa seluruh kegiatan dalam komponen-komponen IKU telah dilaksanakan dengan optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	96,13%	95,32%

IKU Tingkat Indeks Penilaian Integritas Unit menjadi bagian dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sejak pada tahun kinerja 2023 hingga tahun 2024. Meskipun pada tahun 2024 realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sedikit menurun namun telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,32% dengan indeks capaian 112,14.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	95,32%

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa survei yang dilaksanakan pada empat komponen indeks yaitu indeks pelayanan, indeks pemeriksaan, indeks pengawasan dan indeks penagihan sudah baik, Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas pelayanan wajib pajak yang diberikan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis sudah sesuai dengan kode etik dan kode perilaku pegawai.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	95,32%

Tercapainya IKU indeks penilaian integritas unit tahun 2024 merupakan hasil komitmen dari seluruh pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis untuk memberikan pelayanan secara prima kepada wajib pajak, menjaga integritas dalam bekerja, dan menerapkan kode etik serta kode perilaku pegawai.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mencapai realisasi nilai survei pada empat komponen indeks, diperlukan upaya keras untuk dapat menghubungi dan memantau wajib pajak untuk dapat mengisi survei secara tepat waktu melalui tautan yang sudah dikirim kepada *email* wajib pajak. Monitoring dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu hari.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusli yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Depok Cimanggis dalam mencapai IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 merupakan wujud dari sinergi yang dibangun oleh seluruh pegawai yang terlibat, baik dari Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Wajib pajak yang tidak mendapatkan *email* survei maupun ingin mengganti *email* yang digunakan direspon dengan cepat oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang kemudian disampaikan langsung kepada Direktorat KITSDA untuk segera ditindaklanjuti. Monitoring jumlah wajib pajak secara intensif dan mengingatkan wajib pajak secara berkala menjadi upaya ekstra untuk mencapai target pengisian minimal responden survei penilaian integritas unit.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya dan organisasi. Beberapa langkah yang dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi proses penghimpunan responden survei;
- b. Melakukan monitoring secara struktural melalui pimpinan unit kerja;
- c. Pelaksanaan monitoring melalui aplikasi yang mudah diakses;

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Seluruh kegiatan rencana aksi merupakan penunjang dari keberhasilan mencapai realisasi IKU. Mulai dari mengunpulkan data responden yang kooperatif hingga memastikan seluruh responden mengisi survey tepat waktu. Seluruh pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki peran penting dalam melayani wajib pajak secara prima sehingga hasil survei penilaian integritas unit dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan tahun ini sehingga upaya-upaya yang sudah disusun pada periode kali ini merupakan langkah mitigasi seperti menghimpun data wajib pajak yang memberikan respon positif,

memastikan dan memvalidasi email yang digunakan wajib pajak, serta menekankan kembali kepada seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan prima dengan menerapkan kode etik serta kode perilaku pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama yang dihadapi untuk mencapai realisasi IKU indeks penilaian integritas unit adalah menghubungi wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan kriteria periode pelayanan dalam kurun waktu bulan Januari s.d. September sehingga wajib pajak sudah kurang aktif merespon pegawai yang menghubungi. Selain itu, beberapa wajib pajak yang berhasil dihubungi meminta dikirimkan survei melalui Alamat *email* yang berbeda sehingga dibutuhkan waktu untuk melakukan *broadcast* yang baru. Kendala yang cukup berat juga adalah memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa *link* yang dikirim melalui *email* wajib pajak merupakan *link* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak ditengah maraknya saat itu banyaknya penipuan berbahaya yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU indeks penilaian integritas unit menjadi IKU penunjang bagi seluruh IKU lainnya. Seluruh komponen di dalamnya akan membantu membentuk kualitas dari Sumber Daya Manusia sebagai peran utama. SDM yang berkualitas, berintegritas dan kemampuan melayani wajib pajak dengan baik mampu menghasilkan nilai potensi dan realisasi penerimaan pajak. Pajak yang terkumpul akan menjadi kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Komponen indeks pelayanan, penagihan, pengawasan, pemeriksaan merupakan komponen yang menjadi *basic* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. Pelaksanaan survey penilaian integritas unit mendorong kepada seluruh pegawai untuk menjaga integritas dengan baik, bekerja secara profesional dan memegang teguh kode etik serta kode perilaku pegawai. Kompetensi yang baik, integritas yang kuat dan budaya kerja yang nyaman dapat memacau pegawai untuk menjalankan pekerjaan penggalan potensi perpajakan dengan optimal sehingga dapat memproduksi surat himbuan, kegiatan penagihan aktif maupun membuat laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Hal tersebut dapat menjadi potensi besar pencapaian realisasi penerimaan anggaran. Secara tidak langsung perwujudan IKU ini akan memberi manfaat pada tujuan proram-program pemerintah.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merekapitulasi daftar nawa wajib pajak yang diusulkan oleh seksi pengawasan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan sesuai dengan ketentuan; Memastikan dan memvalidasi alamat <i>email</i> Wajib Pajak benar; Menghimbau wajib yang belum mengisi survei baik melalui telepon maupun WA dan terus melakukan monitoring secara berkala; Memberikan pelayanan perpajakan prima kepada Wajib Pajak; Menjaga integritas dan memegang teguh kode etik dan kode perilaku pegawai. 	2025

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	28.88%	48.64%	48.64%	88.10%	88.10%	96.10%	96.10%
Capaian	120	103.49	103.49	125.86	125.86	106.78	106.78

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai

tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

$$\text{Implementasi Manajemen} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

- **Realisasi IKU**

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,93
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,88	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,88
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,14
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,10	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,78

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realisasi atas IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajerial risiko yaitu mencapai realisasi 96,10% dengan indeks capaian 106,78. Hal ini menandakan bahwa seluruh kegiatan dalam komponen-komponen IKU telah dilaksanakan dengan optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	96,10%

IKU Tingkat Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko berdasarkan manual IKU merupakan IKU baru pada tahun kinerja 2024, sehingga tidak memiliki data historis. Pada tahun 2024 realisasi capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,10% dengan indeks capaian 106,78.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90%	96,10%

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa proses pengelolaan manajemen kinerja maupun manajemen risiko di lingkungan KPP Pratama Depok Cimanggis sudah berjalan dengan optimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	-	96,10%

Tercapainya IKU indeks penilaian integritas unit tahun 2024 merupakan hasil komitmen dari Pimpinan KPP Pratama Depok Cimanggis dan seluruh jajarannya untuk mengelola kinerja dan melakukan manajemen risiko untuk dapat mencapai hasil maksimal pada setiap sasaran strategis maupun seluruh Indikator Kinerja yang diamanatkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mencapai realisasi atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, diperlukan beberapa upaya seperti:

- Menyusun piagam risiko pada awal tahun dan upaya mitigasinya;
- Membuat dan menyampaikan Laporan Pemantauan Profil Risiko triwulanan secara tepat waktu;
- Melakukan penarikan data dan pelaksanaan Rapat DKO tepat waktu;
- Melakukan sosialisasi budaya kinerja kepada seluruh pegawai;
- Melakukan pemantauan jam pelatihan pegawai secara berkala;

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Depok Cimanggis dalam mencapai IKU indeks efektivitas manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun kinerja 2024 tidak luput dari beberapa solusi seperti:

- a. Rutin menyampaikan agenda manajemen kinerja kepada seluruh pegawai, baik melalui nota dinas maupun melalui *group whatsapp*;
- b. Memberikan sosialisasi manajemen kinerja dengan tema menyesuaikan kebutuhan pegawai;
- c. Melakukan *Early Warning* terhadap seluruh kepala seksi terkait Capaian IKU untuk NKO dan Pembahasan DKRO;
- d. Memastikan DKRO dilaksanakan secara efektif, baik waktu pelaksanaan maupun kelengkapan administrasi
- e. Monitoring secara berkala proses manajemen kinerja pegawai pada aplikasi *e-performance*:

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tercapai dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya dan organisasi. Beberapa langkah yang dilalui adalah sebagai berikut:

- d. Proses administrasi manajemen kinerja maupun manajemen risiko dilakukan secara digital;
- e. Melalui aplikasi *e-performance* proses monitoring menjadi lebih efisien;
- f. Lapoaran Nilai Kinerja Organisasi telah tertuang pada dashboard capaian kinerja pada aplikasi mandor DJP;

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan dari Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi manajemen kinerja yang rutin dilaksanakan setiap triwulan;
- b. Sinkronisasi pada kegiatan rapat Dialog Kinerja Organisasi dengan pembahasan Manajemen Risiko sehingga mulai pada triwulan III terdapat perubahan pada pengelolaan manajemen kinerja. Hal tersebut membuat penyelesaian proses administrasi menjadi lebih efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan pelaksanaan kinerja tahun ini sehingga upaya-upaya yang sudah disusun pada periode kali ini merupakan langkah mitigasi seperti menyusun peta risiko, melakukan penarikan data NKO dengan tepat, melakukan monitoring secara berkala terkait proses manajemen kinerja pegawai, dan melakukan persiapan dan penyusunan bahan rapat DKRO agar pelaksanaan menjadi lebih efektif dan efisien.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, untuk mencapai target IKU terdapat beberapa kendala seperti *updating* data pada aplikasi mandor maupun nota dinas pemberitahuan terkait realisasi IKU baru muncul ketika mendekati jatuh tempo pelaksanaan DKRO. Selain itu, pada proses manajemen kinerja pegawai kendala yang sering muncul seperti:

- a. Pegawai lupa PIN Digital Signature;
 - b. Pada saat jatuh tempo pelaksanaan terdapat pegawai yang cuti;
- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU indeks penilaian integritas unit menjadi IKU penunjang bagi seluruh IKU lainnya. Seluruh komponen di dalamnya akan membantu memonitoring atas pencapaian IKU lainnya dan memitigasi risiko-risiko tidak tercapainya IKU. Melalui proses manajemen kinerja pegawai seluruh hasil kerja pegawai dalam satu tahun akan terekam dan terevaluasi. Seluruh pekerjaan yang telah dilalui menjadi lebih terukur. Selain itu, adanya DKRO juga menjadi salah satu kegiatan penting untuk membahas terkait rencana-rencana aksi maupun kendala yang dihadapi untuk mencapai seluruh IKU dan mencari Solusi terbaik termasuk pada Solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pajak yang terkumpul akan menjadi kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Proses pencapaian indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko menjadi penunjang untuk mencapai realisasi penerimaan pajak. Secara tidak langsung perwujudan IKU ini akan memberi manfaat pada tujuan proram-program pemerintah.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar kejadian yang perlu dilakukan mitigasi pada awal tahun dan membuat perencanaan pemantauan; • Monitoring rencana aksi bulanan Mitigasi Risiko; • Membuat dan menyampaikan Laporan Pemantauan Profil Risiko triwulanan secara tepat waktu; • Melakukan penarikan data dan pelaksanaan Rapat DKRO tepat waktu; • Melakukan sosialisasi budaya kinerja kepada seluruh pegawai; • <i>Early Warning</i> terhadap seluruh kepala seksi terkait Capaian IKU untuk NKO dan Pembahasal DKRO; • Monitoring secara berkala proses manajemen kinerja pegawai pada aplikasi <i>e-performance</i>; 	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103.08%	100.49%	100.49%	101.94%	101.94%	120%	120%
Capaian	103.08	100.49	100.49	101.94	101.94	120	120

Sumber: Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Depok Cimanggis

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

$$* \text{ Koefisien } 0,2 = (\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) \\ = (95-91) / (120-100)$$

$$** \text{ Koefisien } 0,55 = (\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) \\ = (91-80) / (100-80)$$

- **Realisasi IKU**

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

Sumber: Dashboard Capaian Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor DJP

Berdasarkan data pada Aplikasi Mandor DJP, didapatkan bahwa realiasi atas IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai 120%. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai kinerja atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Depok Cimanggis sudah berjalan dengan baik.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97,39%	96,79	93,17%	94,72%	120%

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mencapai 120%. Nilai realisasi ini merupakan nilai realisasi terbesar sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa KPP Pratama Depok Cimanggis terus melakukan perbaikan atas proses pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100%	120%

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai kinerja atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Depok Cimanggis sudah berjalan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	120%

Tercapainya IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan wujud sinergi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta kerja sama yang baik dengan seluruh rekanan KPP Pratama Depok Cimanggis sepanjang tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU indeks kinerja kualitas anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menjalankan rencana yang sudah disusun baik rencana belanja maupun rencana pengadaan;
- Melakukan revisi halaman 3 DIPA;
- Mengisi capaian output pada aplikasi;
- Melakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) setiap awal triwulan;
- Mengupayakan realisasi anggaran sesuai target triwulan;
- Memperhatikan jatuh tempo pendaftaran kontrak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Depok Cimanggis dalam mencapai IKU indeks efektivitas manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun kinerja 2024 tidak luput dari beberapa solusi seperti:

- Memperhatikan jatuh tempo pembayaran (maksimal 17 HK dari BAST/kuitansi);
- Memperhatikan ketentuan revisi per triwulan;
- Menyesuaikan pembayaran Kontrak Pengadaan dengan Target Realisasi per triwulan;
- Melakukan kerja sama yang baik dengan rekanan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya dan organisasi. Beberapa langkah yang dilalui adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi proses administrasi anggaran;
- Melakukan rapat berkala tim keuangan;
- Penggunaan aplikasi keuangan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang penuh keberhasilan IKU ini adalah dengan adanya sinergi yang baik antara Kuasa Pengguna Anggaran, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, melalui rapat tim keuangan yang rutin dilaksanakan dapat menjadi salah satu langkah komunikasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang timbul.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi pada periode sebelumnya masih berkaitan dengan pelaksanaan kinerja tahun ini sehingga upaya-upaya yang sudah disusun pada periode kali ini merupakan langkah mitigasi seperti menjalankan rencana yang sudah disusun baik rencana belanja maupun rencana pengadaan sesuai dengan *time line* serta menyesuaikan pembayaran Kontrak Pengadaan dengan Target Realisasi per triwulan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam tahun berjalan sering timbul keadaan dimana rencana pencairan dana tidak sesuai dengan realisasi pencairan dana sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut sehingga kualitas pelaksanaan anggaran tetap terjaga.

- **Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menjadi penunjang bagi seluruh IKU lainnya. Upaya-upaya untuk realisasi penerimaan pajak, kegiatan penyuluhan, pengawasan, penagihan aktif dan kegiatan-kegiatan lain telah dianggarkan sesuai dengan nilai perencanaan masing-masing. Diharapkan dengan ketersediaan anggaran yang ada dapat secara maksimal digunakan untuk mencapai tujuan utama yaitu penerimaan pajak. Melalui proses Pajak yang terkumpul akan menjadi kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Proses pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menjadi kegiatan penunjang untuk pembiayaan seluruh upaya kegiatan pencapaian realisasi penerimaan pajak. Secara tidak langsung perwujudan IKU ini akan memberi manfaat pada tujuan proram-program pemerintah.

6. Rencana Aksi Tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana belanja maupun rencana pengadaan; Melakukan kordinasi dengan pejabat pengadaan dan PPK; Melakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) setiap awal triwulan; Mengupayakan realisasi anggaran sesuai target triwulan; Mengisi capaian output sesuai target Memperhatikan jatuh tempo pendaftaran kontrak Menyesuaikan pembayaran Kontrak Pengadaan dengan Target Realisasi per triwulan 	2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan dana untuk menunjang seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun. Hal ini tentu saja guna mendukung operasional dalam rangka mencapai target kinerja. Sumber Pembiayaan KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2024 berasal dari dana DIPA BA 015 sejumlah Rp 5.475.660.000. Realisasi Penggunaan DIPA BA 015 KPP Pratama Depok Cimanggis adalah sebagai berikut:

Sumber	Alokasi Dana	Realisasi Penggunaan	Sisa Anggaran
DIPA BA 015	Rp 5.475.660.000	Rp 5.186.636.396	Rp 289.023.604

adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,475,660,000	0	4,636,410,901	550,225,495	5,186,636,396	94.72 %	289,023,664
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	973,459,000	0	893,489,511	55,786,000	949,275,511	97.52 %	24,183,489
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	421,670,000	0	385,750,796	24,605,000	410,355,796	97.32 %	11,314,204
BMA Data dan Informasi Publik	421,670,000	0	385,750,796	24,605,000	410,355,796	97.32 %	11,314,204
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	102,450,000	0	91,469,408	10,065,000	101,534,408	99.11 %	915,592
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	102,450,000	0	91,469,408	10,065,000	101,534,408	99.11 %	915,592
005.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	102,450,000	0	91,469,408	10,065,000	101,534,408	99.11 %	915,592
521211 Belanja Bahan	8,250,000	0	5,463,700	2,225,000	7,688,700	93.20 %	561,300
000008. Makan Rapat	4,850,000	0	4,638,000	0	4,638,000	99.74 %	12,000
000009. Snack Rapat	3,800,000	0	825,700	2,225,000	3,050,700	84.74 %	549,300
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,200,000	0	18,325,000	3,625,000	21,950,000	98.87 %	250,000
000010. Perjalanan Dinas Biasa	22,200,000	0	18,325,000	3,625,000	21,950,000	98.87 %	250,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72,000,000	0	67,680,708	4,215,000	71,895,708	99.86 %	104,292
000011. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	72,000,000	0	67,680,708	4,215,000	71,895,708	99.86 %	104,292
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	319,220,000	0	294,281,388	14,540,000	308,821,388	96.74 %	10,398,612
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	319,220,000	0	294,281,388	14,540,000	308,821,388	96.74 %	10,398,612
005.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	319,220,000	0	294,281,388	14,540,000	308,821,388	96.74 %	10,398,612
521211 Belanja Bahan	67,420,000	0	56,162,470	1,555,000	57,717,470	85.61 %	9,702,530
000001. Spanduk/Banner/Siker	12,570,000	0	8,064,200	0	8,064,200	64.31 %	4,485,800
000002. Makan Rapat	4,500,000	0	4,482,500	0	4,482,500	99.61 %	17,500
000003. Snack Rapat	12,000,000	0	8,687,500	1,555,000	10,242,500	85.35 %	1,757,500
000004. Seminar Kit	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000104. Sarana dan Prasarana Kegiatan Pengumpulan Data	35,850,000	0	34,908,270	0	34,908,270	97.37 %	941,730
522151 Belanja Jasa Profesi	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000005. Honor Pakar/Praktisi/Profesional	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160,000,000	0	156,295,918	3,150,000	159,445,918	99.65 %	554,082

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 2 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Perjalanan Dinas Biasa	160,000,000	0	156,295,918	3,150,000	159,445,918	99.65 %	554,082
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91,700,000	0	81,823,000	9,835,000	91,658,000	99.95 %	42,000
000007. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	91,700,000	0	81,823,000	9,835,000	91,658,000	99.95 %	42,000
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	255,818,000	0	229,829,815	16,636,000	246,465,815	96.34 %	9,352,185
BMB Komunikasi Publik	255,818,000	0	229,829,815	16,636,000	246,465,815	96.34 %	9,352,185
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	123,501,000	0	110,042,600	12,186,000	122,228,600	98.97 %	1,272,400
100 Tidak Ada Komponen	123,501,000	0	110,042,600	12,186,000	122,228,600	98.97 %	1,272,400
100.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	123,501,000	0	110,042,600	12,186,000	122,228,600	98.97 %	1,272,400
521211 Belanja Bahan	5,150,000	0	4,908,700	0	4,908,700	95.31 %	241,300
000012. Spanduk/Banner/Siker	1,150,000	0	1,102,700	0	1,102,700	95.89 %	47,300
000013. Snack Rapat Biasa SPT Tahunan	1,600,000	0	1,516,000	0	1,516,000	94.75 %	84,000
000014. Makan Rapat Biasa SPT Tahunan	2,400,000	0	2,290,000	0	2,290,000	95.42 %	110,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	115,800,000	0	103,383,900	12,186,000	115,569,900	99.80 %	230,100
000015. IHT	54,000,000	0	53,995,000	0	53,995,000	99.99 %	5,000
000016. ICV	61,800,000	0	49,388,900	12,186,000	61,574,900	99.64 %	225,100
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,200,000	0	1,050,000	0	1,050,000	87.50 %	150,000
000017. Perjalanan Dinas Biasa	1,200,000	0	1,050,000	0	1,050,000	87.50 %	150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,351,000	0	700,000	0	700,000	51.81 %	651,000
000018. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang	1,351,000	0	700,000	0	700,000	51.81 %	651,000
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	132,317,000	0	119,787,215	4,450,000	124,237,215	93.89 %	8,079,785
100 Tanpa Komponen	132,317,000	0	119,787,215	4,450,000	124,237,215	93.89 %	8,079,785
100.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	132,317,000	0	119,787,215	4,450,000	124,237,215	93.89 %	8,079,785
521211 Belanja Bahan	85,097,000	0	81,730,615	1,850,000	83,580,615	96.22 %	1,516,385
000019. Seminar Kit	47,575,000	0	47,348,215	0	47,348,215	99.52 %	226,785
000020. Banner/Spanduk/Backdrop	5,097,000	0	4,051,900	0	4,051,900	79.50 %	1,045,100
000021. Makan Rapat Biasa	18,025,000	0	17,785,000	0	17,785,000	98.67 %	240,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 3 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000022. Snack Rapat Biasa	14,400,000	0	12,545,500	1,850,000	14,395,500	99.97 %	4,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,320,000	0	22,266,600	0	22,266,600	99.76 %	53,400
000023. Business Development Service	22,320,000	0	22,266,600	0	22,266,600	99.76 %	53,400
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	1,800,000	0	1,800,000	25.00 %	5,400,000
000024. Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	3,600,000	0	1,800,000	0	1,800,000	50.00 %	1,800,000
000025. Honor Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000026. SMS Blast	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,700,000	0	7,400,000	200,000	7,600,000	98.70 %	100,000
000027. Perjalanan Dinas Biasa	7,700,000	0	7,400,000	200,000	7,600,000	98.70 %	100,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0	6,590,000	2,400,000	8,990,000	99.89 %	10,000
000028. Uang Transport Dalam Kabupaten Kota Pulang pergi PP	9,000,000	0	6,590,000	2,400,000	8,990,000	99.89 %	10,000
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	295,971,000	0	277,908,900	14,545,000	292,453,900	98.81 %	3,517,100
BCE Penanganan Perkara	84,445,000	0	77,060,000	4,750,000	81,810,000	96.88 %	2,635,000
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	84,445,000	0	77,060,000	4,750,000	81,810,000	96.88 %	2,635,000
100 Tidak Ada Komponen	84,445,000	0	77,060,000	4,750,000	81,810,000	96.88 %	2,635,000
100.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	84,445,000	0	77,060,000	4,750,000	81,810,000	96.88 %	2,635,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	71,845,000	0	65,050,000	4,750,000	69,800,000	97.15 %	2,045,000
000029. Biaya Pengumuman Lelang	1,745,000	0	0	0	0	0.00 %	1,745,000
000030. Biaya Penyampaian SPMP	2,700,000	0	500,000	1,900,000	2,400,000	88.89 %	300,000
000031. Biaya Penyampaian Surat Paksa	67,400,000	0	64,550,000	2,850,000	67,400,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	8,600,000	0	8,600,000	95.56 %	400,000
000032. Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	8,600,000	0	8,600,000	95.56 %	400,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	3,410,000	0	3,410,000	94.72 %	190,000
000033. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	3,600,000	0	3,410,000	0	3,410,000	94.72 %	190,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 4 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	211,526,000	0	200,848,900	9,795,000	210,643,900	99.58 %	882,100
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	50,830,000	0	43,891,500	6,070,000	49,961,500	98.29 %	868,500
100 Tidak Ada Komponen	50,830,000	0	43,891,500	6,070,000	49,961,500	98.29 %	868,500
100.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	50,830,000	0	43,891,500	6,070,000	49,961,500	98.29 %	868,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,830,000	0	12,888,000	1,300,000	14,188,000	95.67 %	642,000
000034. Perjalanan Dinas Biasa	14,830,000	0	12,888,000	1,300,000	14,188,000	95.67 %	642,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000	0	31,003,500	4,770,000	35,773,500	99.37 %	226,500
000035. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	36,000,000	0	31,003,500	4,770,000	35,773,500	99.37 %	226,500
BIG.004 Laporan Hasil Pemantauan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	140,814,000	0	137,088,400	3,725,000	140,813,400	100.00 %	600
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	140,814,000	0	137,088,400	3,725,000	140,813,400	100.00 %	600
005.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	140,814,000	0	137,088,400	3,725,000	140,813,400	100.00 %	600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,814,000	0	49,538,400	1,275,000	50,813,400	100.00 %	600
000037. Perjalanan Dinas Biasa	50,814,000	0	49,538,400	1,275,000	50,813,400	100.00 %	600
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,000,000	0	87,550,000	2,450,000	90,000,000	100.00 %	0
000038. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	90,000,000	0	87,550,000	2,450,000	90,000,000	100.00 %	0
BIG.005 Laporan Penilaian	19,882,000	0	19,869,000	0	19,869,000	99.93 %	13,000
100 Tidak Ada Komponen	19,882,000	0	19,869,000	0	19,869,000	99.93 %	13,000
100.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	19,882,000	0	19,869,000	0	19,869,000	99.93 %	13,000
521211 Belanja Bahan	19,882,000	0	19,869,000	0	19,869,000	99.93 %	13,000
000036. Plakat	19,882,000	0	19,869,000	0	19,869,000	99.93 %	13,000
WAProgram Dukungan Manajemen	4,502,201,000	0	3,742,921,390	494,439,495	4,237,360,885	94.12 %	264,840,115
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3,605,517,000	0	3,074,587,390	348,494,495	3,423,081,885	94.94 %	182,435,115
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,605,517,000	0	3,074,587,390	348,494,495	3,423,081,885	94.94 %	182,435,115
EBA.001 Kerumahlinggaan	115,627,000	0	93,936,812	14,261,000	108,197,812	93.57 %	7,429,188
100 Tidak Ada Komponen	115,627,000	0	93,936,812	14,261,000	108,197,812	93.57 %	7,429,188
100.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	115,627,000	0	93,936,812	14,261,000	108,197,812	93.57 %	7,429,188

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 5 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	14,400,000	0	7,951,250	4,798,000	12,749,250	88.54 %	1,650,750
000086. Makan Rapat Biasa	4,800,000	0	1,832,000	2,387,500	4,219,500	87.91 %	580,500
000087. Snack Rapat Biasa	9,600,000	0	6,119,250	2,410,500	8,529,750	88.85 %	1,070,250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,327,000	0	221,000	0	221,000	5.11 %	4,106,000
000088. Stiker	4,327,000	0	221,000	0	221,000	5.11 %	4,106,000
522151 Belanja Jasa Profesi	800,000	0	400,000	0	400,000	50.00 %	400,000
000089. Honorarium Rohaniwan	800,000	0	400,000	0	400,000	50.00 %	400,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	18,100,000	0	8,910,000	8,982,000	17,892,000	98.85 %	208,000
000090. Jasa Pembersihan Peralatan Komputer	18,100,000	0	8,910,000	8,982,000	17,892,000	98.85 %	208,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,000,000	0	59,800,562	0	59,800,562	99.67 %	199,438
000091. Perjalanan Dinas Biasa	60,000,000	0	59,800,562	0	59,800,562	99.67 %	199,438
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,000,000	0	16,654,000	481,000	17,135,000	95.19 %	865,000
000092. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	18,000,000	0	16,654,000	481,000	17,135,000	95.19 %	865,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,489,890,000	0	2,980,650,578	334,233,495	3,314,884,073	94.99 %	175,005,927
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,489,890,000	0	2,980,650,578	334,233,495	3,314,884,073	94.99 %	175,005,927
002.0A KPP Pratama Depok Cimanggis	3,489,890,000	0	2,980,650,578	334,233,495	3,314,884,073	94.99 %	175,005,927
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,395,668,000	0	1,256,663,453	130,057,050	1,386,720,503	99.36 %	8,947,497
000039. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	503,916,000	0	468,764,000	35,152,000	503,916,000	100.00 %	0
000040. Pakaian Dinas Pegawai	74,635,000	0	73,099,050	0	73,099,050	97.94 %	1,535,950
000041. Seragam Satuan Pengaman	24,380,000	0	24,364,500	0	24,364,500	99.94 %	15,500
000042. Seragam Petugas Kebersihan/Pramubhakti	8,832,000	0	8,791,200	0	8,791,200	99.54 %	40,800
000043. Honorarium Satpam dan Pengemudi	563,580,000	0	516,340,000	47,229,250	563,569,250	100.00 %	10,750
000044. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	204,325,000	0	160,068,703	39,685,800	199,754,503	97.78 %	4,570,497
000102. Honorarium Lembur PPNPN	16,000,000	0	5,236,000	7,990,000	13,226,000	82.66 %	2,774,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152,400,000	0	116,561,147	13,011,786	129,572,933	85.02 %	22,827,067
000045. Pengiriman Surat Dinas	152,400,000	0	116,561,147	13,011,786	129,572,933	85.02 %	22,827,067

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 6 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	87,840,000	0	57,120,000	11,424,000	68,544,000	78.03 %	19,296,000
000046. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	5,400,000	0	4,500,000	900,000	5,400,000	100.00 %	0
000047. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4,320,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	33.33 %	2,880,000
000048. Honorarium Staf Pengelola	16,272,000	0	8,960,000	1,792,000	10,752,000	66.08 %	5,520,000
000049. Honorarium Bendahara Pengeluaran	6,192,000	0	3,440,000	688,000	4,128,000	66.67 %	2,064,000
000050. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	2,880,000	0	0	0	0	0.00 %	2,880,000
000051. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	3,000,000	0	2,500,000	500,000	3,000,000	100.00 %	0
000052. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm	5,928,000	0	3,960,000	792,000	4,752,000	80.16 %	1,176,000
000053. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	17,208,000	0	10,360,000	2,072,000	12,432,000	72.25 %	4,776,000
000054. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,144,000	0	15,120,000	3,024,000	18,144,000	100.00 %	0
000055. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	4,896,000	0	4,080,000	816,000	4,896,000	100.00 %	0
000056. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	41,520,000	0	32,373,000	2,943,000	35,316,000	85.06 %	6,204,000
000057. Kearsipan	23,520,000	0	15,873,000	1,443,000	17,316,000	73.62 %	6,204,000
000058. Jasa Dokter	18,000,000	0	16,500,000	1,500,000	18,000,000	100.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	302,472,000	0	234,737,295	62,774,980	297,512,275	98.36 %	4,959,725
000059. Dosir Kepegawain	54,000,000	0	22,200,000	31,800,000	54,000,000	100.00 %	0
000060. Barang Konsumsi ATK	115,008,000	0	114,236,720	0	114,236,720	99.33 %	771,280
000061. Obat-obatan	21,840,000	0	19,687,400	1,984,000	21,671,400	99.23 %	168,600
000062. Perlengkapan Fotokopi/Komputer	59,628,000	0	29,711,925	28,990,980	58,702,905	98.45 %	925,095
000063. Pengadaan Material Tempel	3,000,000	0	200,000	0	200,000	6.67 %	2,800,000
000064. Perlengkapan Printer	48,996,000	0	48,701,250	0	48,701,250	99.40 %	294,750
522111 Belanja Langganan Listrik	444,000,000	0	338,195,464	30,324,857	368,520,321	83.00 %	75,479,679
000065. Langganan Listrik	444,000,000	0	338,195,464	30,324,857	368,520,321	83.00 %	75,479,679
522112 Belanja Langganan Telepon	21,021,000	0	18,298,457	1,990,530	20,288,987	96.52 %	732,013
000066. Langganan Telepon	21,021,000	0	18,298,457	1,990,530	20,288,987	96.52 %	732,013

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522113 Belanja Langganan Air	225,000	0	0	0	0	0 0.00 %	225,000
000067. Langganan Air	225,000	0	0	0	0	0 0.00 %	225,000
522141 Belanja Sewa	264,300,000	0	208,372,427	34,040,182	242,412,609	91.72 %	21,887,391
000068. Sewa Mesin Fotokopi	140,000,000	0	115,440,000	13,015,860	128,455,860	91.75 %	11,544,140
000069. Sewa Printer	43,800,000	0	35,520,000	7,104,000	42,624,000	97.32 %	1,176,000
000070. Sewa Tanaman	36,000,000	0	28,971,000	5,794,200	34,765,200	96.57 %	1,234,800
000103. Sewa Alat Pengharum Ruangan	44,500,000	0	28,441,427	8,126,122	36,567,549	82.17 %	7,932,451
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	427,120,000	0	410,325,009	15,601,050	425,926,059	99.72 %	1,193,941
000071. Pemeliharaan Halaman Gedung Bangunan	27,120,000	0	26,418,000	0	26,418,000	97.41 %	702,000
000072. Pemeliharaan Gedung Bangunan	400,000,000	0	383,907,009	15,601,050	399,508,059	99.88 %	491,941
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	353,024,000	0	308,004,326	32,066,060	340,070,386	96.33 %	12,953,614
000073. Pemeliharaan AC Split	49,860,000	0	49,491,970	0	49,491,970	99.26 %	368,030
000074. Biaya Pemeliharaan Tabung Pemadam Api	4,500,000	0	0	4,417,800	4,417,800	98.17 %	82,200
000075. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	26,480,000	0	17,641,700	1,671,500	19,313,200	67.81 %	9,166,800
000076. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	160,000,000	0	148,604,856	9,119,500	157,724,356	98.58 %	2,275,644
000077. Pemeliharaan CCTV	14,000,000	0	5,152,200	8,846,700	13,998,900	99.99 %	1,100
000078. Pemeliharaan Faksimile	500,000	0	0	0	0	0 0.00 %	500,000
000079. Pemeliharaan Genset 100 KVA	5,000,000	0	0	4,990,560	4,990,560	99.81 %	9,440
000080. Pemeliharaan Inventaris Kantor	8,400,000	0	7,968,500	0	7,968,500	94.86 %	431,500
000081. Pemeliharaan Mesin Absensi	2,500,000	0	1,171,050	1,320,000	2,491,050	99.64 %	8,950
000082. Pemeliharaan Mesin Antrian	8,504,000	0	8,502,600	0	8,502,600	99.98 %	1,400
000083. Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	71,250,000	0	69,471,450	1,700,000	71,171,450	99.89 %	78,550
000084. Pemeliharaan Printer	30,000	0	0	0	0	0 0.00 %	30,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
000085. Pembelian BBM Genset	300,000	0	0	0	0	0 0.00 %	300,000
WA 4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	896,684,000	0	668,334,000	145,945,000	814,279,000	90.81 %	82,405,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 635752 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

Hal 8 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	896,684,000	0	668,334,000	145,945,000	814,279,000	90.81 %	82,405,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	896,684,000	0	668,334,000	145,945,000	814,279,000	90.81 %	82,405,000
001 Gaji dan Tunjangan	896,684,000	0	668,334,000	145,945,000	814,279,000	90.81 %	82,405,000
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	896,684,000	0	668,334,000	145,945,000	814,279,000	90.81 %	82,405,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	829,000,000	0	634,426,000	129,110,000	763,536,000	92.10 %	65,464,000
000093. Uang Makan Golongan II	202,300,000	0	151,270,000	27,335,000	178,605,000	88.29 %	23,695,000
000094. Uang Makan Golongan III	536,500,000	0	423,132,000	88,245,000	511,377,000	95.32 %	25,123,000
000095. Uang Makan Golongan IV	90,200,000	0	60,024,000	13,530,000	73,554,000	81.55 %	16,646,000
512211 Belanja Uang Lembur	67,684,000	0	33,908,000	16,835,000	50,743,000	74.97 %	16,941,000
000096. Uang Lembur Golongan II	16,824,000	0	9,748,000	5,928,000	15,676,000	93.18 %	1,148,000
000097. Uang Lembur Golongan III	31,500,000	0	21,859,000	8,850,000	30,709,000	97.49 %	791,000
000098. Uang Lembur Golongan IV	5,040,000	0	2,190,000	0	2,190,000	43.45 %	2,850,000
000099. Uang Makan PNS Gol I dan II	5,075,000	0	0	910,000	910,000	17.93 %	4,165,000
000100. Uang Makan PNS Gol III	7,400,000	0	111,000	1,147,000	1,258,000	17.00 %	6,142,000
000101. Uang Makan PNS Gol IV	1,845,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,845,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu program kegiatan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu rencana kerja. Semakin besar ketersediaan dananya maka dapat semakin efektif terhadap suatu pencapaian kinerja apabila dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran maupun rencana pengadaan. Revisi anggaran beberapa kali dilaksanakan dikarenakan penggunaan anggaran masih belum merata disetiap bulan. Penggunaan dana masih didominasi di bulan November dan Desember serta telah dilakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang dibuat secara periodik sehingga penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Nilai Kinerja Anggaran mencapai 98,75%. Untuk mencapai nilai tersebut KPP Pratama Depok Cimanggis telah melakukan beberapa aksi sesuai dengan rencana yang telah disusun yaitu berkordinasi secara rutin antara tim keuangan sehingga rencana belanja yang telah disusun dapat dilaksanakan tepat waktu, melakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) setiap awal triwulan dan mengupayakan realisasi anggaran sesuai dengan target triwulan. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Nilai Kinerja Anggaran, KPP Pratama Depok Cimanggis juga telah menyusun rencana aksi diantaranya melakukan pembahasan dengan *Board of Directors* (BOD) terkait DIPA dalam rangka penyusunan rencana kegiatan, menyesuaikan pembayaran kontrak pengadaan dengan target realisasi per triwulan, mengisi capaian output sesuai target, memperhatikan jatuh tempo pendaftaran kontrak, memperhatikan jatuh tempo pembayaran, memperhatikan kualitas pengelolaan uang persediaan, memperhatikan ketentuan revisi per triwulan, serta mengoptimalkan efisiensi anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi salah satu hal penting atas tercapainya Indeks Kinerja Utama (IKU). Seluruh pegawai KPP Pratama Depok Cimanggis memiliki peran besar dalam pencapaian kinerja organisasi melalui capaian IKU masing-masing dan penggerak proses mekanisme keberhasilan dalam organisasi. Adapun langkah yang telah ditempuh KPP Pratama Depok Cimanggis untuk tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Proses kerja administrasi telah dilakukan secara digital;
- b. Dukungan teknologi dan informasi yang telah terintegrasi;
- c. Melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk kegiatan *visit* kepada Wajib Pajak dalam proses pengawasan/penggalian potensi, kegiatan penagihan pajak, dan kegiatan lain yang menunjang tercapainya IKU.

Pemantauan dan pengawasan kinerja pegawai lebih ditingkatkan untuk memastikan capaian atas target kinerja organisasi maupun pribadi dapat tercapai secara tepat waktu. Tidak dipungkiri apabila ada distribusi pekerjaan yang kurang merata, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang terkait serta mutasi pegawai di tingkat Kantor Wilayah maupun Nasional yang menyebabkan keterbatasan jumlah SDM. Hal ini berusaha diatasi dengan mengupayakan agar masing-masing pegawai dapat meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan *In House Training* (IHT), Bimbingan Teknis, *e-learning*, maupun *transfer of knowledge* baik dari atasan maupun sesama rekan sejawat.

D. Kinerja Lain-lain

Sebagai bentuk komitmen kepada Wajib Pajak dalam memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, KPP Pratama Depok Cimanggis berhasil mendapatkan Peringkat III pada penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Tahun 2024 tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III.



Sertifikat penghargaan KPT Tahun 2024 tingkat Kanwil DJP Jawa Barat III

Selain itu, KPP Pratama Depok Cimanggis juga turut mendukung terlaksananya Reformasi Perpajakan sebagai upaya pembenahan berbagai aspek yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut tercermin dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti:

1. Pelatihan penggunaan aplikasi *coretax* bagi seluruh pegawai,
2. Sosialisasi atau internalisasi reformasi perpajakan,
3. Mengikuti beberapa pelatihan secara e-learning dengan tema *coretax*,
4. Membentuk *agent of change* atau agen perubahan,

Keempat hal tersebut merupakan upaya KPP Pratama Depok Cimanggis untuk memperkuat pengetahuan dan kompetensi SDM dalam penggunaan aplikasi *coretax*.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Perpajakan untuk pihak eksternal atau Wajib Pajak di antaranya:

1. Mengadakan sosialisasi reformasi perpajakan kepada Wajib Pajak,
2. Membuat kelas pajak secara berkala sebagai sarana Wajib Pajak agar dapat menggunakan aplikasi *coretax* dengan baik.
3. Mengadakan helpdesk *coretax*.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi melakukan program evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Melaporkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) secara konsisten dan berkala per triwulan sepanjang Tahun 2024 kepada Kanwil DJP Jawa Barat III;
2. Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) secara konsisten dan berkala per triwulan sepanjang Tahun 2024;
3. Melakukan pembahasan Mitigasi Risiko secara konsisten dan berkala per triwulan sepanjang Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi serta tugas dan fungsi yang wajib dilaksanakan. LAKIN juga menjadi bagian implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran baik tentang kegiatan pelaksanaan tugas administrasi maupun tugas pada bidang perpajakan yang seluruhnya tertuang dalam indikator kinerja utama. Pencapaian kinerja organisasi merupakan wujud dari perencanaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses pencapaian terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Walau demikian KPP Pratama Depok Cimanggis beserta seluruh jajarannya berusaha keras untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rencana aksi yang sudah disusun, mitigasi risiko, serta dana yang tersedia, terus berkarya secara optimal, sehingga dapat diperoleh capaian nilai kinerja organisasi sebesar 108,048.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait, serta menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis, guna peningkatan pelaksanaan tugas dan kegiatan dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

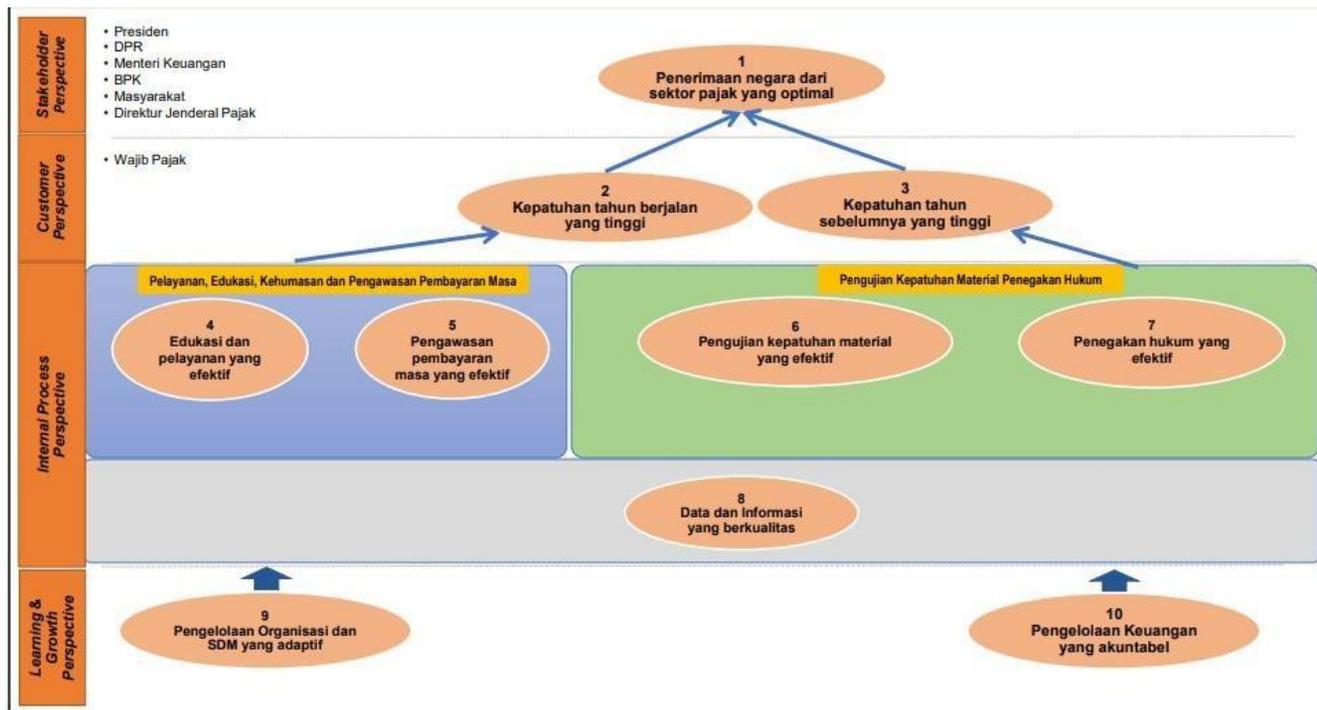
- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- 2. Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024**



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK- 5 /WPJ.33/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK
CIMANGGIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
BARAT III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK
CIMANGGIS
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT
IIIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN
KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajakbruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayananyang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayaratas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yangefektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasanatas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan WajibPajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yangefektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan BuktiPermulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 973,459,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 421,670,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 255,818,000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 295,971,000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	 Rp 4,582,201,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,605,517,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 976,684,000
Total	Rp 5,555,660,000

Depok, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Cimanggis,



Ditandatangani Secara Elektronik
Romadhaniah



Ditandatangani Secara Elektronik
Eko Pandoyo Wisnu Bawono



Depok, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Depok Cimanggis,



Ditandatangani Secara Elektronik
Eko Pandoyo Wisnu Bawono



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Presentase Pengawasan Pembayaran Masa	Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak pada tahun berjalan dengan pemanfaatan STP, dinamisasi PPh Pasal 25 dan tindak lanjut data	1. Meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak 2. Penerimaan setiap masa pajak yang teratur	Q1: Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan	Q1: Surat Tagihan Pajak	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-
				Q2: Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan;	Q2: Surat Tagihan Pajak			
				Q3: Penerbitan STP atas keterlambatan / kekurangan pembayaran PPh, PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya	Q3: Surat Tagihan Pajak			
				Q4: Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak	Q4: Surat Tagihan Pajak			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Mengoptimalkan data penggalan potensi yang telah tersedia yang kemudian dituangkan ke dalam komitmen pembayaran Wajib Pajak	1. Tersedianya bahan potensi perpajakan yang digunakan sebagai acuan dalam penggalan <i>effort</i> 2. Adanya komitmen dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran	Q1 :Pemanfaatan data E- Faktur; PKPM, Apportal	Q1: Kertas Kerja Penggalan Potensi, SP2DK	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-
				Q2 :Pemanfaatan data E- Faktur; PKPM, Apportal	Q2: Kertas Kerja Penggalan Potensi, SP2DK			
				Q3: Pemanfaatan data E- Faktur; PKPM, Apportal	Q3: Kertas Kerja Penggalan Potensi, SP2DK			
				Q4: Konseling / Pemanggilan Pengurus Badan / WP OP	Q4: Berita Acara			
3.	Tingkat Efektivitas Penagihan	Memastikan bahwa pencegahan ditujukan kepada Wajib Pajak yang berpotensi melunasi utang pajak	1. Usulan pencegahan ke Kantor Wilayah 2. Berita Acara Gelar Perkara 3. Meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak	Q1: Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan	Q1: Surat Perintah Melakukan Penyitaan	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan , Penilaian dan Penagihan	-
				Q2: Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan	Q2: Surat Perintah Melakukan Penyitaan			
				Q3: Penjualan Barang Sitaan	Q3: Pengumuman Lelang			
				Q4: Usulan Pencegahan/	Q4: NDR pencegahan			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Penyanderaan Penanggung Pajak				
4.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Pengumpulan data di lapangan yang dapat dijadikan potensi dalam penerimaan pajak	Terpenuhinya data potensi perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk KPP sendiri atau KPP lain	Q1: Kegiatan pengumpulan data lapangan	Q1: Formulir KPDL	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	-
				Q2: Kegiatan pengumpulan data lapangan	Q2: Formulir KPDL			
				Q3: Kegiatan pengumpulan data lapangan	Q3: Formulir KPDL			
				Q4: Reviu pelaksanaan kegiatan	Q4: Angka realisasi kegiatan			
5.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan efisiensi anggaran	1. Laporan reviu Triwulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja	Q2: Menyusun dokumen permintaan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan	Q2: Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja	Januari - Desember 2024	Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Q2: Menyusun dokumen permintaan pertanggungjawaban pembayaran	Q2: Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				tunjangan				
				Q3: Menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban belanja	Q3: Laporan Pertanggungjawaban Belanja			
				Q4: Menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan tingkat KPP secara berkala	Q4: Laporan Keuangan tingkat KPP			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok
Cimanggis,



Ditandatangani Secara Elektronik
Eko Pandoyo Wisnu Bawono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Eko Pandoyo Wisnu Bawono		Nama	Romadhaniah
NIP	196711061995031000		NIP	196712121995032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/Ivb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan

3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis

	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III	Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	<p>pihak untuk berkontribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Depok, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Eko Pandoyo Wisnu Bawono
196711061995031000



Ditandatangani secara elektronik
Romadhaniah
196712121995032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1	102 pegawai							
2	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Depok, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Eko Pandoyo Wisnu Bawono
196711061995031000



Ditandatangani secara elektronik
Romadhaniah
196712121995032001



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	96,77
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,77
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	92,34	Max	P/L	19,00%	42,22%	92,34
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,81
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,55
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,00
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,88%	Max	P/L	19,00%	42,22%	117,88
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,07
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,06
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,77
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,53%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,53
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,40%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							112,05
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,07%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,07
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,83%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,83
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	101,29%	Max	P/M	14,00%	33,33%	101,29
7	Penegakan hukum yang efektif							118,47
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,86%	Max	P/L	19,00%	36,54%	115,81
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	77,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,97
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,93
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	116,88	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,88
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,14
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,10	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,04

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB